



LAPORAN KINERJA



**20
24**

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH SULAWESI**

B P P H L H K W I L . S U L A W E S I

Jalan Batara Bira No. 9, Baddoka, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
08114411441





Laporan Kinerja Tahun 2024

Disusun dan diterbitkan oleh

**Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi**

Tim Penyusun

Pengarah

**Aswin Bangun
William D.T. Tengker
Abdul Waqqas
Muhammad Amin
Subagio**

Anggota

**Atira Afrianti
Akhyar
Muhammad Fahrul
Patimah
Hironimus Renggi Unggu
Wahyuni Eka Muqni
Sahl Faqihuddin
Ummul Mu'minin
Darul Amri
Kurnia
Andre Periatno Liputo
Windah Afryani
Nuranisa Harfiana**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPHLHK Wilayah Sulawesi selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai capaian, tantangan, dan strategi yang telah diimplementasikan dalam upaya menegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Sulawesi. Penyusunan laporan ini mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024.

Kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program kerja secara terencana, transparan, dan akuntabel demi mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Laporan ini mencakup informasi mengenai penanganan kasus-kasus pelanggaran, upaya pengawasan, kerja sama dengan pemangku kepentingan, serta program-program preventif yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun mitra lainnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi yang diberikan oleh semua pihak dalam mendukung penegakan hukum dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Sulawesi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Sulawesi.

Palopo, 10 Januari 2025

Kepala Balai,

Asmita Bangun, S.Hut., M.Si.

NIP. 197402282000031004



Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	2
Tugas dan Fungsi	3
Struktur Organisasi	4
Isu Strategis	8
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
Akuntabilitas Kinerja	25
Efisiensi	27
Realisasi Anggaran	84
Penghargaan Atas Prestasi Kinerja.....	87
BAB 4 PENUTUP	90
Kesimpulan	91
Saran	92
LAMPIRAN.....	95



PENGANTARAN

Latar Belakang

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tujuan penting dalam meningkatkan kinerja lembaga pemerintah. Prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan pelayanan prima menjadi fondasi utama dalam mencapai pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merujuk pada mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang mencakup evaluasi atas pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan program untuk menurunkan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Sulawesi selama tahun 2024.

Melalui penerapan SAKIP, Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta pengelolaan sumber daya alam secara lebih transparan, efisien, dan responsif. Selain menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun berjalan, laporan ini juga memberikan arahan strategis untuk peningkatan kinerja di masa mendatang, sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem di wilayah Sulawesi.



Tugas dan Fungsi

Melaksanakan Kegiatan
Penurunan Gangguan,
Ancaman dan Pelanggaran
Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Tugas

BPPHLHK Wilayah Sulawesi

Fungsi

BPPHLHK Wilayah Sulawesi

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
- e. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
- g. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- h. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- j. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Hubungan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Struktur Organisasi

Kepala Balai

Aswin Bangun, S.Hut., M.Si.



Kepala Sub Bagian Tata Usaha

William D.T. Tengker., S.H., M.Hum.



Kepala Seksi I Wilayah
Abdul Waqqas, S.Sos



Kepala Seksi II Wilayah
Muhammad Amin, S.H., M.H.

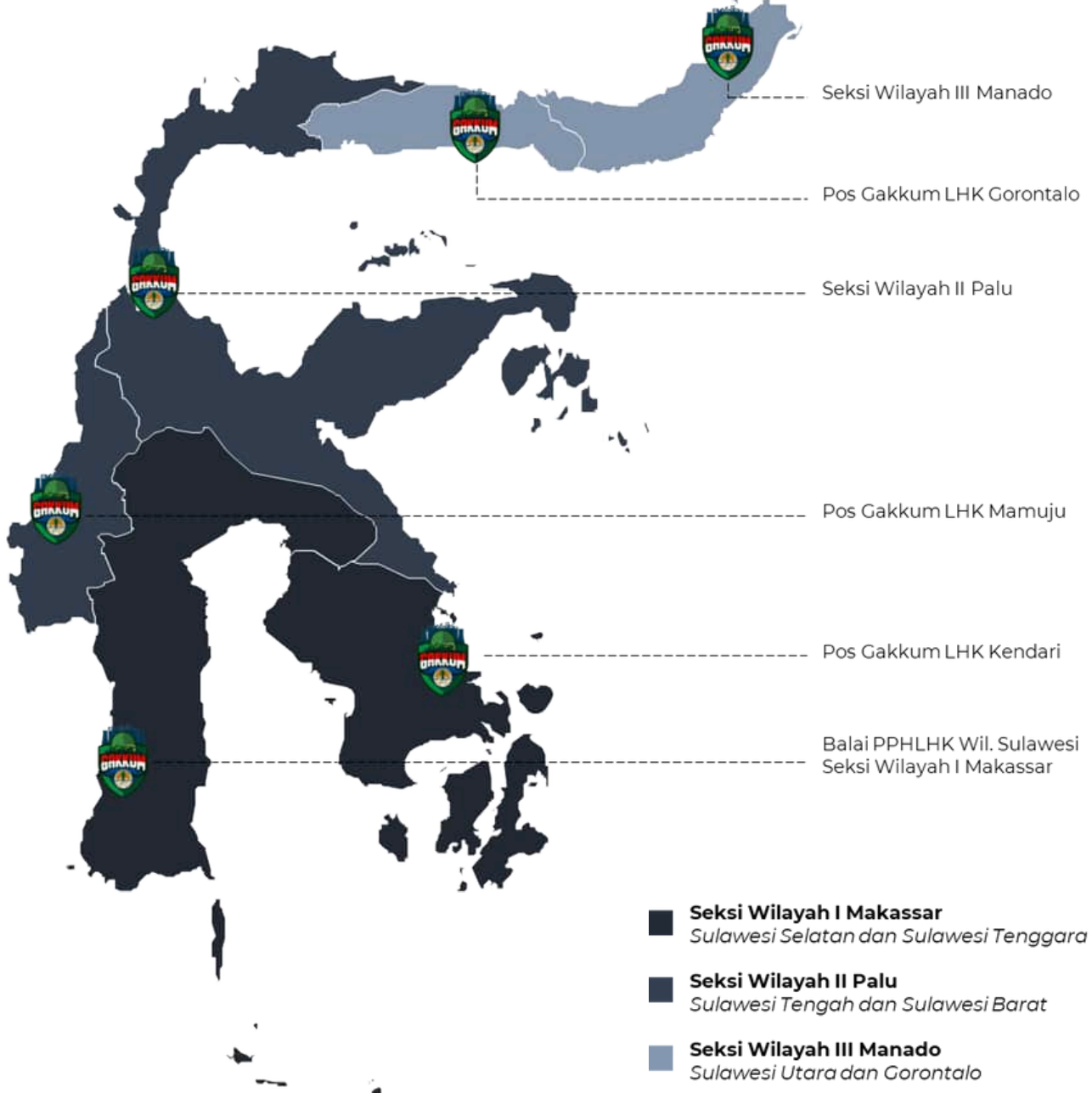


Kepala Seksi III Wilayah
Subagio, S.H., MAP

Kelompok Jabatan Fungsional



BPPHLHK WILAYAH SULAWESI



BRIGADE ANOA



BRIGADE MALEO

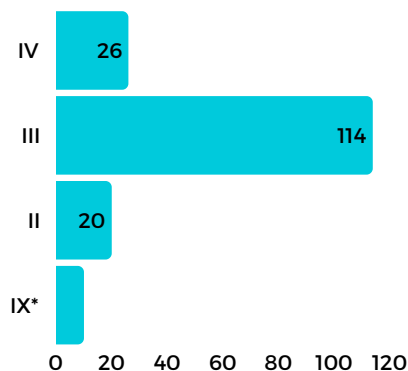
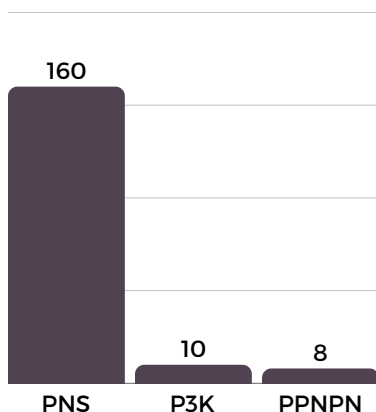


BRIGADE KERA HITAM

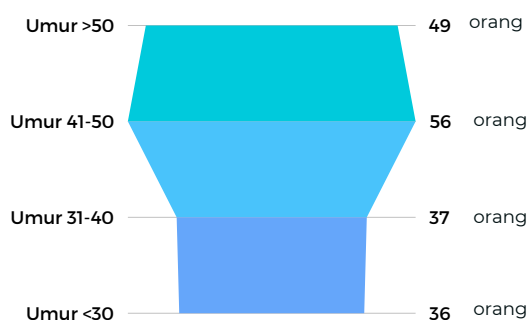
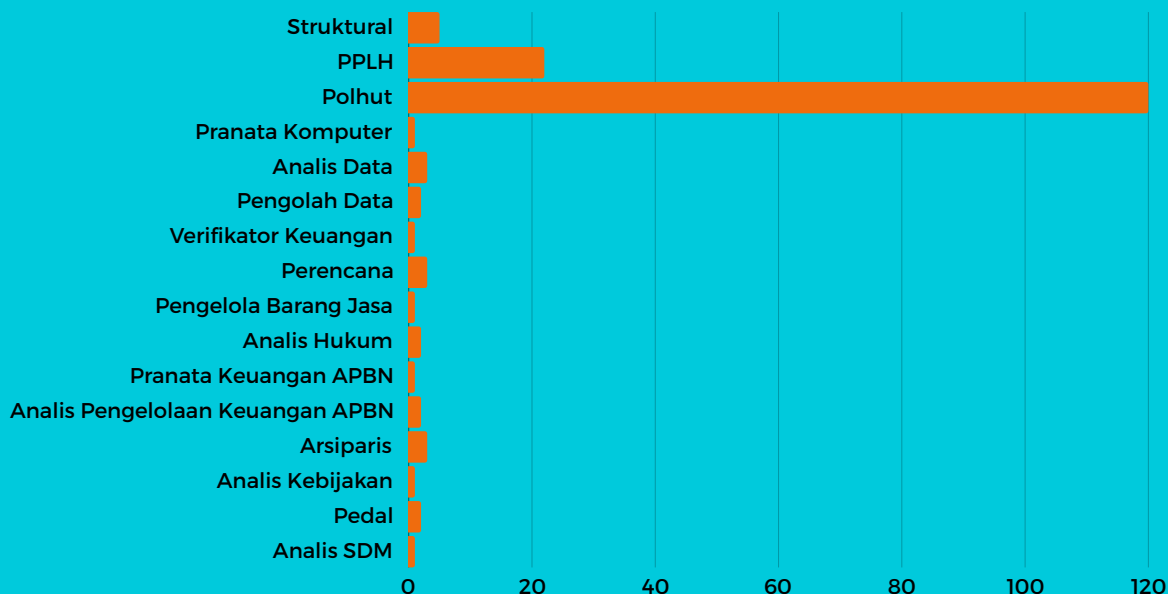
SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) di BPPHLHK Wilayah Sulawesi memegang peranan penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta penegakan hukum di bidang kehutanan. Keberhasilan BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sangat bergantung pada kualitas, kompetensi, dan profesionalisme SDM yang dimilikinya.

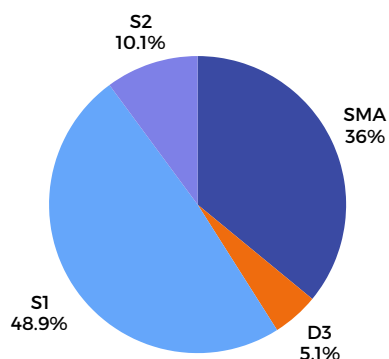
Komposisi Golongan



Proporsi Gender



Komposisi Umur



Pendidikan ASN

Sarana Prasarana

Barang Milik Negara Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi dalam Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sub Kelompok Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	8.924.057.536
2	Peralatan dan Mesin	27.706.367.741
3	Gedung dan Bangunan	16.060.044.568
4	Jalan dan Jembatan	246.222.250
5	Irigasi	180.220.000
6	Jaringan	22.082.500
7	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.488.545.176
8	Barang Konsumsi	1.870.000
9	Amunisi	69.327.429
10	Software	56.000.000
JUMLAH		54.754.737.200

Aset tersebut merupakan hasil mutasi tambah yang berasal dari Pengadaan Barang/pembelian melalui DIPA BPPHLHK Wilayah Sulawesi dan transfer masuk hingga 31 Desember 2024.



Isu Strategis

Berikut adalah isu-isu strategis yang dihadapi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi sepanjang tahun 2024:

1. Meningkatnya Ancaman terhadap Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan kawasan hutan di enam provinsi di Sulawesi masih tinggi. Aktivitas seperti pembalakan liar, penggunaan ilegal kawasan hutan, perdagangan satwa liar, perambahan hutan, perkebunan dan penambangan ilegal, kebakaran hutan, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi isu yang terus berlangsung.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Tantangan utama dalam sumber daya manusia meliputi kurangnya tenaga fungsional umum di bagian Tata Usaha dan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) yang belum sebanding dengan luas kawasan yang harus dilindungi. Selain itu, kebutuhan tenaga Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) terus meningkat. Meskipun sarana dan prasarana telah memenuhi standar, ketersediaannya di lapangan masih belum mencukupi.



3. Kompleksitas Kejahatan Lingkungan dan Kehutanan

Kejahatan lingkungan kini semakin kompleks, melibatkan pelaku dari berbagai kalangan, mulai dari individu di lapangan, korporasi, hingga kelompok terorganisasi dengan dukungan dari elit berpengaruh dan oknum aparat. Modus operandi juga semakin canggih, termasuk pemanfaatan teknologi dalam perdagangan satwa liar secara daring.

4. Permasalahan dalam Pengawasan, Pengaduan, dan Penerapan Sanksi Administrasi

Belum optimalnya penanganan pengaduan dan pengawasan antara lain belum tersedianya *database* kegiatan usaha yang merupakan kewenangan KLHK, Penggunaan Platform online. Kurang optimalnya Pemantauan Penerapan sanksi administrasi yang dilimpahkan kepada DLH

Dengan tantangan yang beragam ini, peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan koordinasi, serta pengembangan kebijakan yang tepat menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kehutanan serta penegakan hukum LHK di wilayah Sulawesi pada Tahun 2024.





PERENCANAAN 2 KINERJA



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (RENSTRA BPPHLHK WILAYAH SULAWESI) 2020-2024 disusun sebagai proses adaptasi terhadap perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan tata kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan sektor yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan/atau kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, RENSTRA KLHK dan RENSTRA GAKKUM LHK.



Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024:

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

KLHK telah merumuskan sasaran utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2024 yaitu sirkular ekonomi dan keberdayaan Masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata. Cita-cita pembangunan nasional bangsa Indonesia telah digariskan dalam konstitusi negara. Tujuan tersebut termuat dalam Pembukaan Undang – undang Dasar Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, pembangunan Indonesia perlu dilakukan secara terencana dengan menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaannya berdasarkan prioritas. Penahapannya disusun dengan bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki, serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KLHK tahun 2020-2024 yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar tata kelola.





Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran strategis dari keempat pilar tersebut pencapaiannya dilakukan melalui peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan hutan, penanganan kasus LHK melalui penegakan hukum, peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan produktivitas dan daya saing SDM LHK, reformasi birokrasi, akuntabilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern pemerintah yang semakin matang. Pilar harus didukung satu sama lain sehingga terciptanya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan.

Pilar tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan **Visi KLHK** yaitu **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”**. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.



Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing LINGKUNGAN, EKONOMI, SOSIAL, DAN TATA KELOLA KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan

Berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Kesejahteraan

Berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu:

“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”.

Untuk itu, rumusan **Misi KLHK** yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.

Melanjutkan visi dan misi Kementerian LHK demi tercapainya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Ditjen Penegakan Hukum LHK telah menentukan visi dan misi unit kerjanya untuk periode 2020-2024. **Visi Ditjen Penegakan Hukum LHK** dalam kurun waktu lima tahun ialah

“Terwujudnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkualitas dan berkeadilan demi keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”.

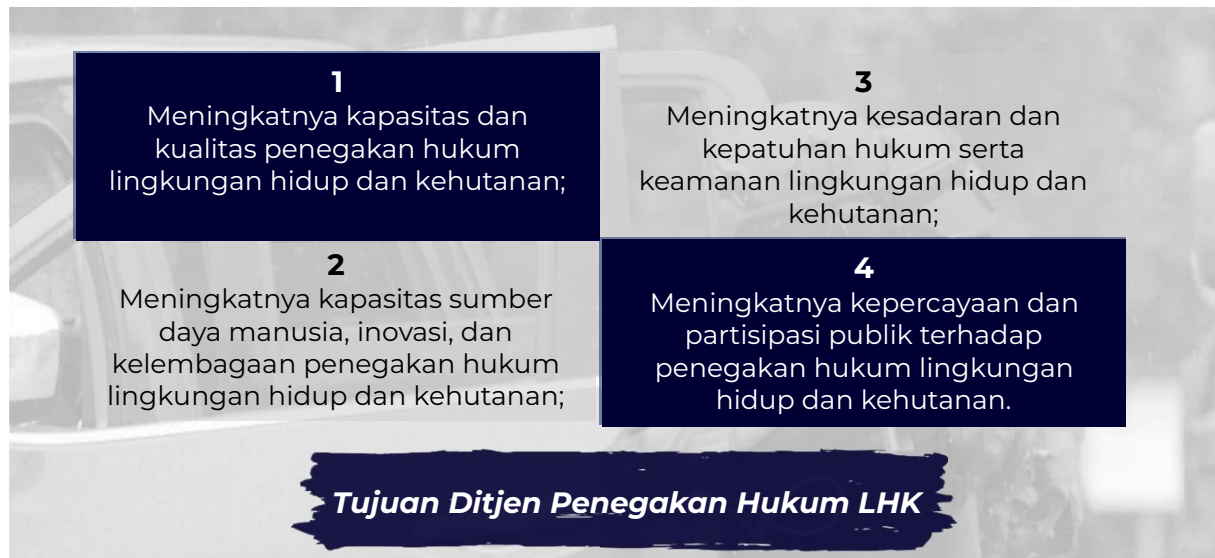
Dengan kata kunci: berkualitas, berkeadilan, dan membangun kepatuhan, Organisasi menentukan 4 (empat) **Misi Ditjen Penegakan Hukum LHK** yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, responsif, dan inovatif serta berkesetaraan gender;
2. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasis sains dan teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum;
3. Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan instrument, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya manusia serta dukungan pengambilan keputusan;
4. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten, bermartabat, dan terpercaya. Disamping itu, sebagai organisasi penegak hukum yang bernaung di bawah Kementerian LHK, Ditjen Penegakan Hukum LHK juga memiliki tujuan esensial yang melandaskan organisasi ini berdiri dan mengakar pada tugas dan fungsi organisasi demi tercapainya.



Disamping itu, sebagai organisasi penegak hukum yang bernaung di bawah Kementerian LHK, Ditjen Penegakan Hukum LHK juga

memiliki tujuan esensial yang melandaskan organisasi ini berdiri dan mengakar pada tugas dan fungsi organisasi demi tercapainya.



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menentukan empat sasaran program yang diharapkan mampu menstimulasi tercapainya sasaran strategis untuk periode pemerintahan tahun 2020-2024.

Untuk menilai tingkat capaian sasaran program yang ditekankan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, indikator kinerja program yang kuantitatif untuk masing-masing sasaran pun sebagaimana tabel berikut:

Program dan Sasaran Program Ditjen Penegakan Hukum LHK

Program	Sasaran Program
Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya budaya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK
	Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang LHK
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman
Dukungan Manajemen	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KLHK

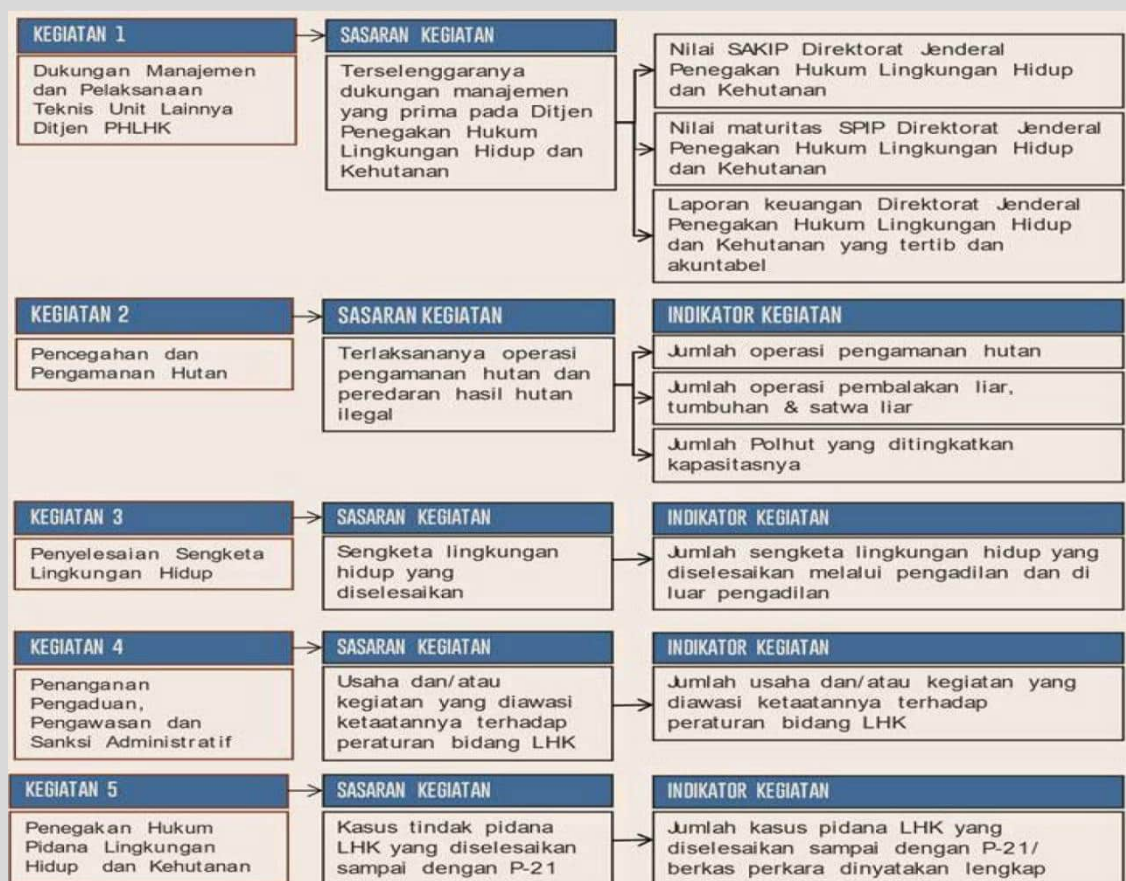


Mengikuti prinsip logic model, bahwa untuk mencapai dampak yang lebih besar, ada hasil yang bersifat lebih spesifik dan harus diperoleh terlebih dahulu dengan jangka waktu yang lebih pendek dan lebih mudah untuk diukur. Sesuai dengan proses bisnisnya, Ditjen Penegakan Hukum LHK memiliki lima unit kegiatan yang beroperasi di dalam organisasi ini, yaitu Unit Kegiatan **Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (PPSA), Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH), Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH), Penegakan Hukum Pidana**

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHP), serta Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis Unit Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK (Dukman).

Masing-masing kegiatan telah menyepakati sasaran kegiatan yang ingin dicapai beserta indikator kinerjanya. Tentu saja tiap indikator dan sasaran kegiatan yang ditentukan akan mendorong pencapaian sasaran program yang bersifat lebih besar. Lebih jelasnya, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Ditjen Penegakan Hukum LHK diilustrasikan pada Gambar dibawah:

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK



Guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPPHLHK Wilayah Sulawesi dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHLHK, UPT Balai

Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi melaksanakan 3 (tiga) program dengan 5 (lima) kegiatan yaitu:

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK

Program	Sasaran Program
Kualitas Lingkungan Hidup	1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; 2. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pencegahan dan Pengamanan Hutan
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



BPPHLHK Wilayah Sulawesi merupakan perpanjangan tangan dari Unit Kerja Eselon II Ditjen PHLHK di daerah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi merupakan kegiatan dari Unit Kerja Eselon II Ditjen PHLHK. BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah menetapkan Target Jangka Menengah (2020-2024) sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra BPPHLHK Wilayah Sulawesi 2020-2024 seperti disajikan pada Tabel.

Matriks Rencana Strategis BPPHLHK Wilayah Sulawesi

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK/KOMP)	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)					
			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN 5427 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							22.910.000	23.400.000	24.160.000	24.308.000	24.630.000		
	Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan kehutanan	Layanan Dukungan manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	1.310.000	1.460.000	1.610.000	1.730.000	1.890.000
		Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	21.600.000	21.940.000	22.550.000	22.578.000	22.740.000
KEGIATAN 5428 : PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN							19.275.000	48.552.000	57.184.000	72.600.000	78.379.000		
	Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Luas Hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan	HEKTAR	250.000	400.000	450.000	450.000	400.000	19.275.000	48.552.000	57.184.000	72.600.000	78.379.000
		Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	17	22	23	27	30					
		Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan Satwa Liar	Operasi	21	47	56	71	75					
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan	Orang	0	115	119	123	126					
KEGIATAN 5430 : Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK							5.946.888	10.623.256	13.073.687	15.722.116	17.986.868		
	Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani	Perusahaan	247	380	443	522	577	5.946.888	10.623.256	13.073.687	15.722.116	17.986.868
		Penanganan Pengaduan Perusahaan	Perusahaan	61	92	105	120	129					
		Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Perusahaan	126	198	236	285	322					
		Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Perusahaan	60	90	102	117	126					
KEGIATAN 5431 : PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							8.831.400	17.265.145	21.069.190	26.169.251	34.113.068		
	Kasus tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/ berkas perkara dinyatakan lengkap	kasus	26	44	47	54	62	8.124.888	15.883.933	19.383.655	24.075.711	31.384.000
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	4	5	5	8	8	706.512	1.381.212	1.685.535	2.093.540	2.729.068



RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi tahun 2024 di *breakdown* dari Target Jangka Menengah 2020-2024. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2024 menyesuaikan dengan pagu alokasi BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Adapun target BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai Komitmen antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi sebagaimana tersaji berikut ini:

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPPHLHK Wilayah Sulawesi

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	
				Semula	Menjadi
1.	Pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	20 Operasi	20 Operasi
			Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	17 Operasi	17 Operasi
			Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang
2.	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Meningkatkan perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara	2 Perkara
3.	Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	111 Badan Usaha	111 Badan Usaha
4.	Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	30 Perkara	30 Perkara
5.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen penegakan hukum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	96,86 Poin	81,00 Poin

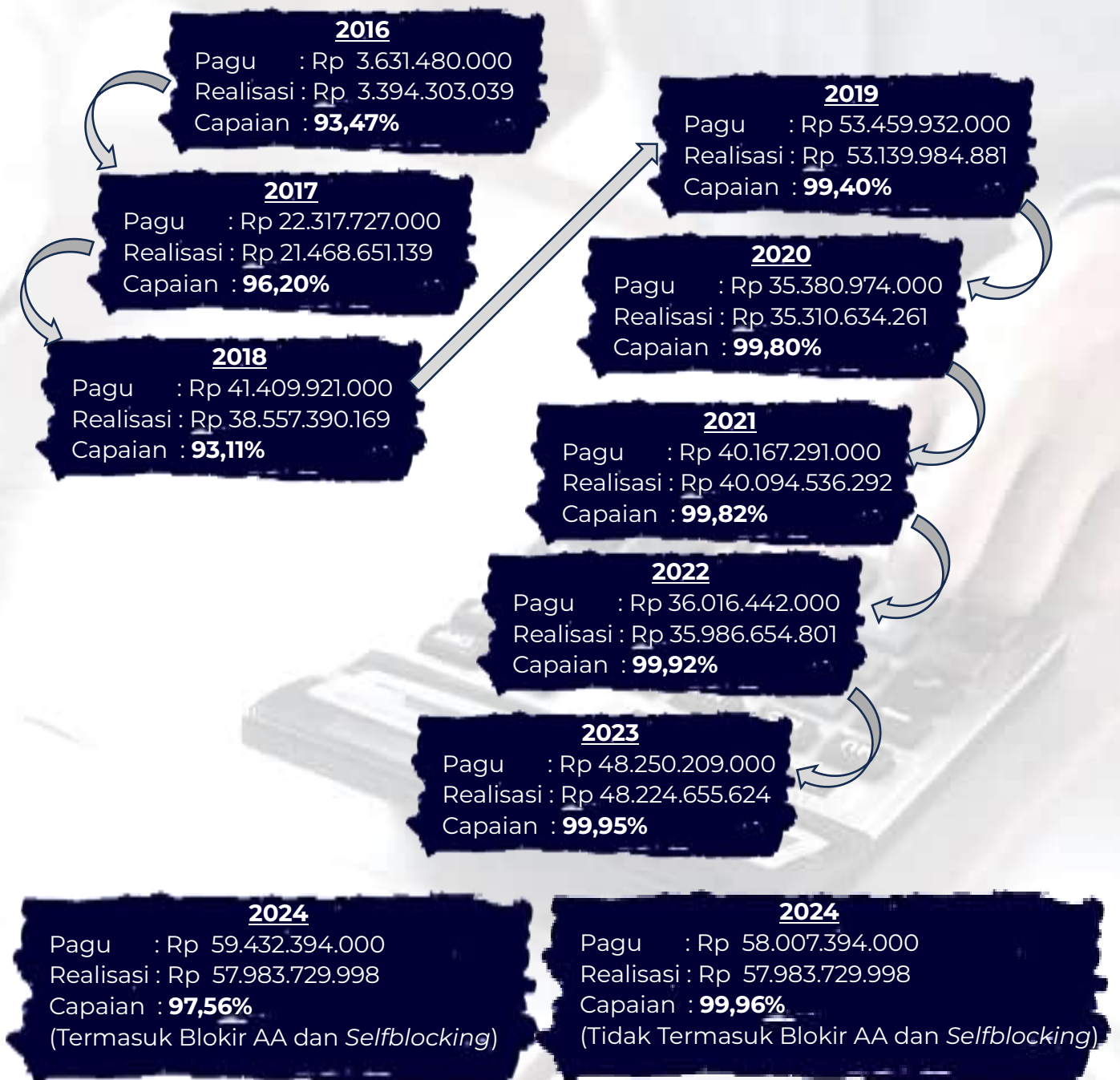
Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO		Anggaran	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	20 Operasi	20 Operasi	Rp 6.417.940.000,-	Rp 5.478.940.000,-
	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	17 Operasi	17 Operasi	Rp 5.611.380.000,-	Rp 5.079.730.000,-
DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	15 Orang	Rp 200.000.000,-	Rp 200.000.000,-
QCE-Penanganan Perkara	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	2 Perkara	2 Perkara	Rp 580.000.000,-	Rp 470.000.000,-
QIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	111 Badan Usaha	111 Badan Usaha	Rp 2.876.350.000,-	Rp 2.650.000.000,-
QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	30 Perkara	30 Perkara	Rp 7.871.380.000,-	Rp 7.441.380.000,-
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	Rp 2.000.000.000,-	Rp 2.000.000.000,-
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Rp 28.089.944.000,-	Rp 29.939.944.000,-
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	Rp 6.372.400.000,-	Rp 6.172.400.000,-
Total Anggaran				Rp 60.019.394.000,-	Rp 59.432.394.000,-*

*Terdapat anggaran terblokir senilai Rp 1.425.000.000,- dikarenakan Kebijakan Nasional Automatic Adjustment dan Penghematan Perjalanan Dinas sehingga Anggaran diluar Blokir AA dan Selfblocking senilai **Rp 58.007.394.000,-**



PERJALANAN ANGGARAN



BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung terus meningkat, pasca covid-19 berdampak pada penurunan alokasi pagu anggaran yang terjadi pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya namun secara capaian realisasi anggaran meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 juga mengalami penurunan alokasi pagu anggaran, karena Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran untuk fokus ke program pemulihan ekonomi nasional pada tahun tersebut.



Tahun 2024 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, *automatic adjustment* yang merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Kementerian Keuangan guna mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara namun sampai akhir tahun 2024 tidak adanya instruksi revisi anggaran untuk menghapus *automatic adjustment* (**Blokir AA**) **senilai Rp 1.200.000.000,-** seperti beberapa tahun sebelumnya. Tahun ini juga menjadi awal perjalanan Presiden baru, sehingga pada saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana tanggal 23 Oktober 2024 di Ruang Sidang Kabinet beliau menekankan pentingnya persatuan dan efisiensi dalam mengelola anggaran.

Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 Nomor S-

1023/MK.02/2024 per tanggal 07 November 2024 terkait penghematan minimal 50% (lima puluh persen) dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat tersebut ditetapkan.

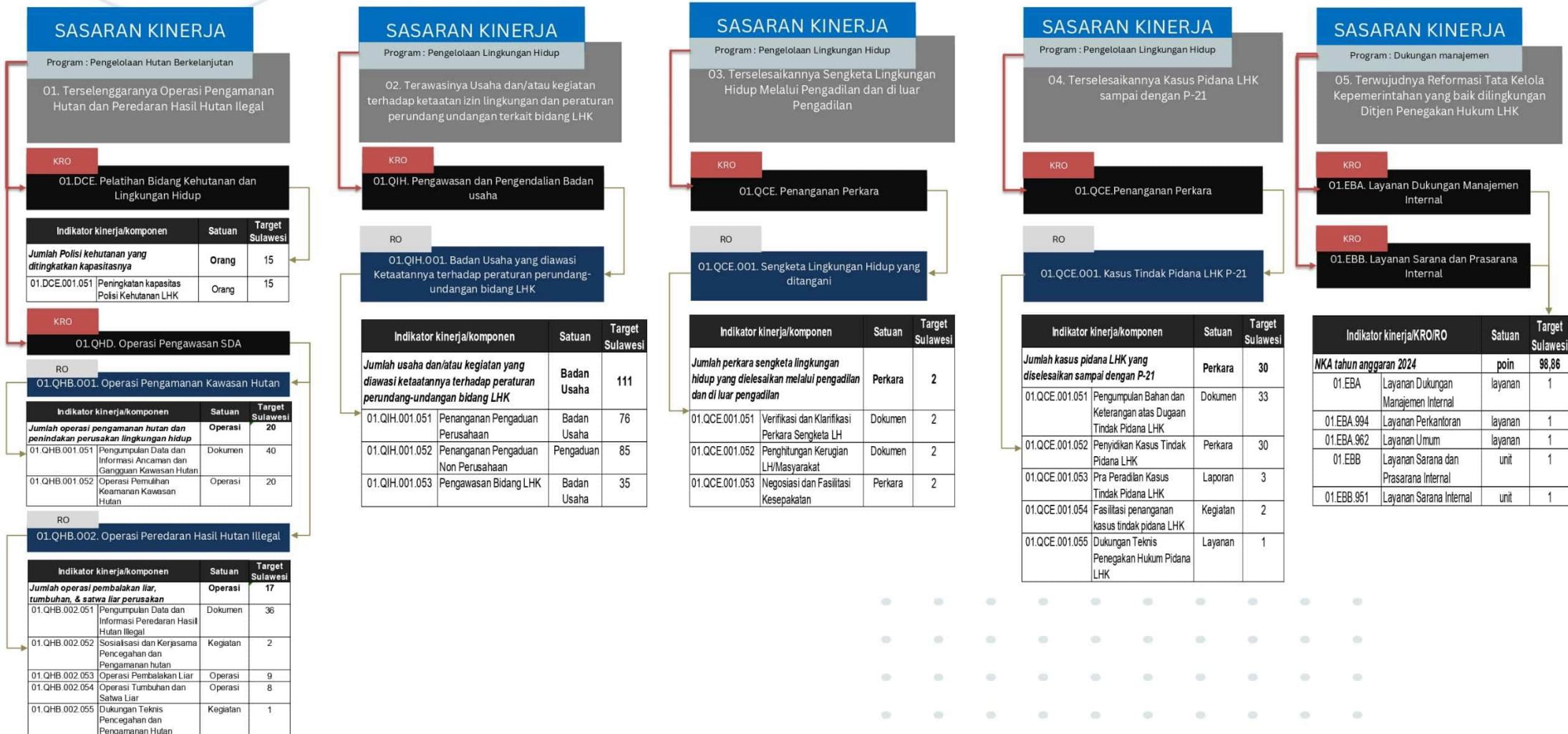
BPPHLHK Wilayah Sulawesi melaksanakan penghematan (**Selfblocking**) **senilai Rp 225.000.000,-** sesuai Memorandum Direkur Jenderal Gakkum LHK Nomor M.7/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.11/2024 per tanggal 11 November 2024. Hingga batas akhir revisi anggaran tidak ada instruksi revisi anggaran untuk menghapus Blokir AA dan *Selfblocking* dengan total Rp 1.425.000.000,- sehingga mempengaruhi capaian realisasi anggaran hanya sebesar **97,56%**, sedangkan jika ada instruksi revisi anggaran untuk menghapus Blokir AA dan *Selfblocking* maka capaian realisasi anggaran sebesar **99,96%**.





POHON KINERJA TAHUN 2024

029.10.UPT. BALAI PPHLHK WILAYAH SULAWESI



SASARAN KINERJA

Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

01. Terselenggaranya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal

KRO

01.DCE. Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja/komponen	Satuan	Target Sulawesi
<i>Jumlah Polisi kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	Orang	15
01.DCE.001.051 Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan LHK	Orang	15

KRO

01.QHD. Operasi Pengawasan SDA

RO

01.QHB.001. Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

Indikator kinerja/komponen	Satuan	Target Sulawesi
<i>Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup</i>	Operasi	20
01.QHB.001.051 Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	Dokumen	40
01.QHB.001.052 Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	Operasi	20

RO

01.QHB.002. Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal

Indikator kinerja/komponen	Satuan	Target Sulawesi
<i>Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan, & satwa liar perusakan</i>	Operasi	17
01.QHB.002.051 Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Dokumen	36
01.QHB.002.052 Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan	Kegiatan	2
01.QHB.002.053 Operasi Pembalakan Liar	Operasi	9
01.QHB.002.054 Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Operasi	8
01.QHB.002.055 Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kegiatan	1

SASARAN KINERJA

Program : Pengelolaan Lingkungan Hidup

02. Terawasnya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK

KRO

01.QIH. Pengawasan dan Pengendalian Badan usaha

RO

01.QIH.001. Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK

Indikator kinerja/komponen	Satuan	Target Sulawesi
<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK</i>	Badan Usaha	111
01.QIH.001.051 Penanganan Pengaduan Perusahaan	Badan Usaha	76
01.QIH.001.052 Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Pengaduan	85
01.QIH.001.053 Pengawasan Bidang LHK	Badan Usaha	35

SASARAN KINERJA

Program : Pengelolaan Lingkungan Hidup

03. Terselenggaranya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan

KRO

01.QCE. Penanganan Perkara

RO

01.QCE.001. Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani

Indikator kinerja/komponen	Satuan	Target Sulawesi
<i>Jumlah perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan</i>	Perkara	2
01.QCE.001.051 Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	Dokumen	2
01.QCE.001.052 Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat	Dokumen	2
01.QCE.001.053 Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	Perkara	2

SASARAN KINERJA

Program : Pengelolaan Lingkungan Hidup

04. Terselenggaranya Kasus Pidana LHK sampai dengan P-21

KRO

01.QCE. Penanganan Perkara

RO

01.QCE.001. Kasus Tindak Pidana LHK P-21

Indikator kinerja/komponen	Satuan	Target Sulawesi
<i>Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21</i>	Perkara	30
01.QCE.001.051 Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	Dokumen	33
01.QCE.001.052 Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	Perkara	30
01.QCE.001.053 Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	Laporan	3
01.QCE.001.054 Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK	Kegiatan	2
01.QCE.001.055 Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	Layanan	1

SASARAN KINERJA

Program : Dukungan manajemen

05. Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Penegakan Hukum LHK

KRO

01.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal

KRO

01.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Indikator kinerja/KRO/RO	Satuan	Target Sulawesi
<i>NKA tahun anggaran 2024</i>	point	98,86
01.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	layanan	1
01.EBA.994. Layanan Perkantoran	layanan	1
01.EBA.962. Layanan Umum	layanan	1
01.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1
01.EBB.951. Layanan Sarana Internal	unit	1



AKUNTABILITAS **U**
KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran kinerja dapat juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target)

kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra Lembaga.

$$\text{Rumus Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus Pengukuran Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakikatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2024

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi dengan Direktur Jenderal PHLHK terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diemban oleh BPPHLK Wilayah Sulawesi.



Hasil Pengukuran capaian kinerja sesuai IKK BPPHLHK Wilayah Sulawesi, sebagaimana tersaji sebagai berikut:



Tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2024

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2024	Realisasi	Capaian
1	Pencegahan dan Pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	20 Operasi	27 Operasi	135.00%
			Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	17 Operasi	25 Operasi	147.06%
			Jumlah POLHUT yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	18 Orang	120.00%
2	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara	2 Perkara	100.00%
3	Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	111 Badan Usaha	124 Badan Usaha	111.71%
4	Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	30 Perkara	38 Perkara	126.67%
5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	81.00 Poin	84.98 Poin	104.91%
% RERATA CAPAIAN IKK						120.76%



EFISIENSI

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dilakukan melalui perbandingan dengan capaian kinerja (fisik) tahun berjalan dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2023. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2024.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Realiasi Anggaran Tahun Berjalan}}{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Berjalan}}$$

Kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rasio perbandingan < 1 atau $= 1$ menunjukkan bahwa dalam pencapaian kinerja tahun 2024 berjalan secara efisien;
2. Rasio perbandingan > 1 menunjukkan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2024.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**AREA INI DALAM PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

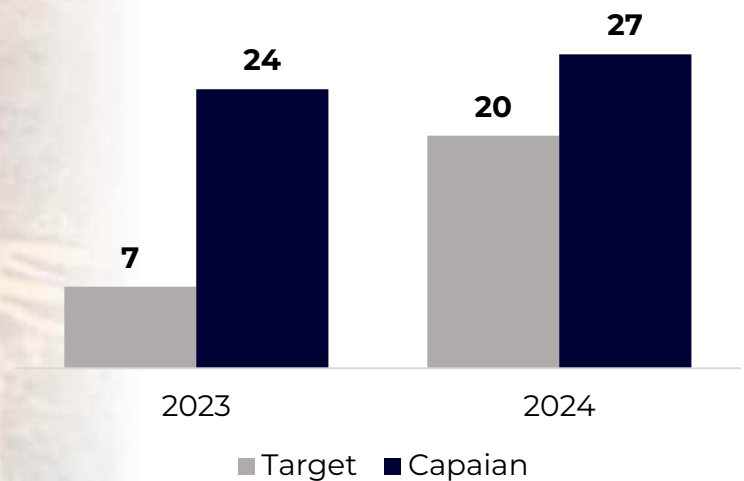
BARANG SIAPA BENGANG SENGULA MEMUTUS, MEMBIANG/ATAU MERUSAK, PENGEREAN SUATO
BENDA OLEH ATAU/ITAS NAMA PENGUSA UMUM YANG BERWENANG STA, BENGHA, CARA LAIN
MENGINGKALKAN PENUTUPAN DENGAN SEGEL DIANCAM RESONAN BIDANA PENGUSA PALING
LAMA 2 TAHUN 11 BULAN (PASAL 232 AYAT 1 KUHP)



JUMLAH OPERASI PENGAMANAN KAWASAN HUTAN

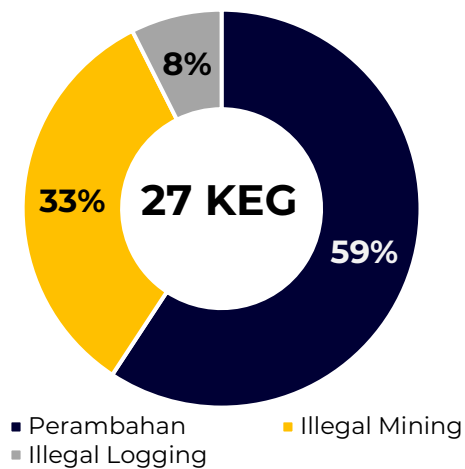


Upaya penurunan gangguan, ancaman dan upaya pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan melalui kegiatan operasi pengamanan kawasan hutan. Pada tahun 2024, capaian kinerja operasi pengamanan kawasan hutan mengalami peningkatan sebesar 11,11% menjadi 27 kegiatan. Angka ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 20 kegiatan dengan persentase capaian sebesar 135%. Peningkatan capaian kinerja menunjukkan hasil kerja nyata BPPHLHK Wilayah Sulawesi.



Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kerja Tahun 2023-2024



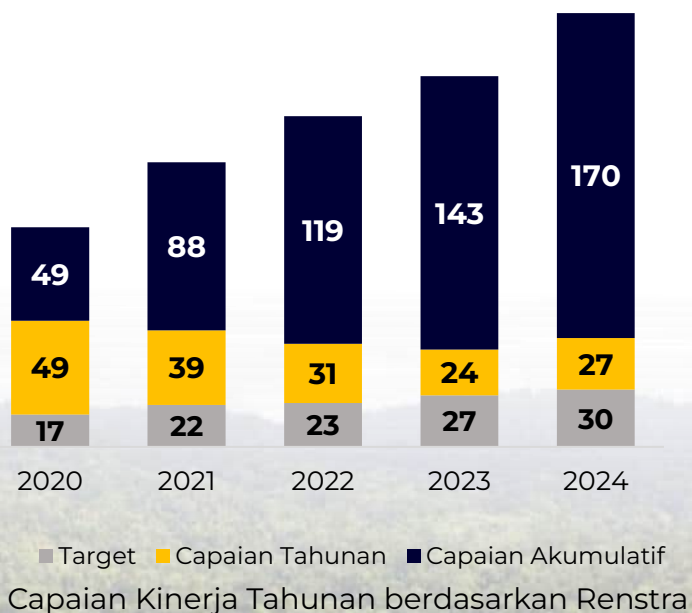


Tipologi Masalah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

Dari 27 kegiatan yang dilaksanakan, ada beberapa tipologi permasalahan yaitu perambahan kawasan hutan, illegal logging dan pertambangan tanpa izin yang didominasi oleh kegiatan perambahan sebesar 59%. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak negatif dari perambahan, serta kebutuhan ekonomi yang mendorong masyarakat membuka lahan untuk digunakan sebagai lahan pertanian.

Melalui kegiatan ini, BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah mengamankan kawasan hutan seluas 247.512 Ha.

Capaian kinerja berdasarkan Renstra BPPHLHK Wilayah Sulawesi Periode 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 1,11%, dengan akumulatif kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun sebanyak 170 kegiatan. Angka ini melebihi target akumulatif yang ditetapkan pada Renstra yaitu 119 kegiatan dengan persentase capaian akumulatif sebesar 143%.





KENDALA DAN UPAYA

Capaian operasi pengamanan kawasan hutan melebihi target yang ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Kinerja dan kecekatan Tim Puldasi dalam mendeteksi, menganalisis dan menyajikan data dan informasi ancaman kejahatan (keanekaragaman hayati dalam kawasan dan perusakan hutan kepada pimpinan dalam rangka pencegahan dan pengamanan hutan.
- b) Peran aktif dan keterlibatan Lembaga Non Pemerintah memberikan informasi dan data ke BPPHLHK Wilayah Sulawesi baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi dan media sosial terkait
- c) Masyarakat ikut andil dalam mendukung kawasan hutan yang terbebas dari ancaman

gangguan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup.

- d) Hasil operasi yang dilakukan merupakan upaya dan komitmen terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat merusak komponen sumber alam di wilayah Sulawesi.
- e) Informasi gangguan keamanan kawasan hutan melalui media sosial.

Kendala

Secara substantif maupun teknis dalam pelaksanaan operasi pengamanan kawasan hutan masih menghadapi beberapa hambatan antara lain:

- a) Persiapan pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu yang cukup lama seperti koordinasi yang melibatkan banyak



instansi dan adanya isu-isu sosial lainnya, sehingga ada kegiatan yang kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu

- b) Bocornya informasi terkait pelaksanaan kegiatan operasi yang diketahui oleh pelaku.
- c) Tingkat kerawanan kamtibmas di beberapa lokasi masih tergolong tinggi.

Upaya Tindak Lanjut

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga keamanan kawasan hutan, sebagai berikut:

- a) Penyajian *database* kawasan hutan yang menjadi prioritas penanganan tindak pidana kehutanan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
- b) Peningkatan Kapasitas tenaga intelijen, SPORC dan Polisi Kehutanan.
- c) Pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan faktor kamtibmas.



NILAI EFISIENSI



Efisiensi



Persentase
Realisasi Anggaran IKK1
(input)



Persentase
Capaian IKK1
(output)

Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	0,63 Efisien	85,47%	135%
Non Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	0,74 Efisien	99,99%	135%

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	Non Blokir AA dan <i>selfblocking</i>		Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	Non Blokir AA dan <i>selfblocking</i>
Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	2.204.389.000	1.454.389.000	1.454.373.601	65,98	100
Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	3.274.551.000	3.229.025.000	3.228.709.931	98,60	99,99
Total	4.683.414.000	5.478.940.000	4.683.083.532	85,47	99,99



Gakkum KLHK Tindak WNA Korea Selatan Pelaku Tambang Ilegal dalam Kawasan Hutan Lindung di Sulbar

Fachri Djaman
Penulis



Video



Kembali Terjadi, Pengusaha Rental Ditemak Hingga



Momen Dramatis, Penghuni Ruko Keluar Saat



Pov Ngobrol Dengan Putri Indonesia Sulsel



Momen Wanita Panik Peluncur Petasannya Terballi

Mitra Terkini

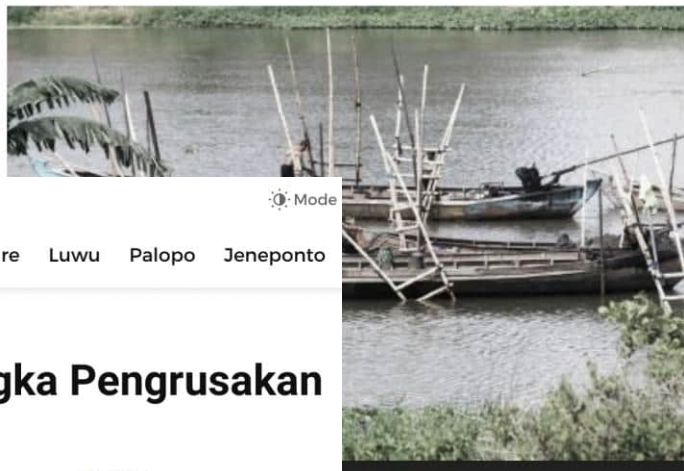


DPRD Parepare Pantau

Gakkum KLHK Amankan WNA Korea Selatan dalam Kasus Penambangan Pasir Ilegal di Sulawesi Barat

Atalya Puspa 06/9/2024 10:29

A- A+



Mitra Terkini

Home / Luwu

Penyidik Gakkum KLHK Limpahkan Tersangka Pengrusakan Cagar Alam Faruhumpenai ke Kejaksaan

Fachri Djaman
Penulis



Gakkum KLHK Limpahkan Tersangka Perusakan Cagar Alam Faruhumpenai ke Kejaksaan

Tri Yari Kurniawan

Minggu, 02 Jun 2024 21:01



Rusak Hutan Lindung, Diduga untuk Akses Tambang, Oknum Kades di Bone Terancam 5 Tahun Penjara

Arwan Rusli
Juni 16, 2024



kti kasus pengrusakan Cagar Alam

awesi melimpahkan
ar Alam (CA)
iaksanaan Neaeri Luwu

JUMLAH OPERASI PEMBALAKAN LIAR, TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

IKK
2

Tipologi gangguan yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan yaitu kejahatan TSL dan perusakan hutan. Kejahatan TSL tersebut terdiri dari perburuan satwa liar, perdagangan TSL baik secara online maupun konvensional (transaksi langsung) dan pemeliharaan TSL ilegal.

Operasi pembalakan liar, Peredaran hasil hutan meliputi penanganan pembalakan liar, peredaran hasil hutan kayu ilegal, perburuan satwa liar dan peredaran TSL.

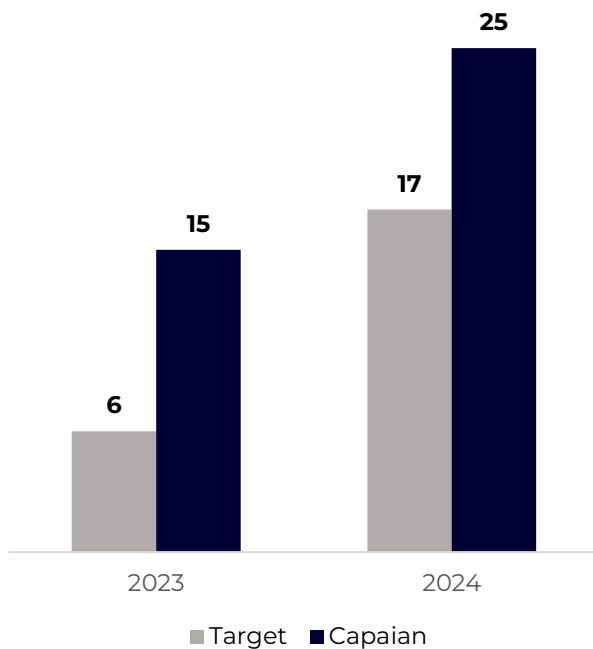
Pada tahun 2024, BPPHLHK Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi peredaran ini yang telah berkontribusi dalam penyelamatan potensi kehilangan asset negara sebagai upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta perbaikan tata kelola hasil hutan.

Target Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan satwa liar berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah sebanyak 17 Operasi.



Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan guna melestarikan keanekaragaman hayati. Capaian IKK telah berhasil melaksanakan giat Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan satwa liar sebanyak 25 Operasi atau 147,06% dari 17 Operasi yang ditargetkan. Melalui pelaksanaan giat operasi tersebut berhasil menyelamatkan 5.014 m³ kayu yang tak berdokumen dan diduga berasal dari kawasan hutan dan satwa liar sejumlah 139 ekor satwa.

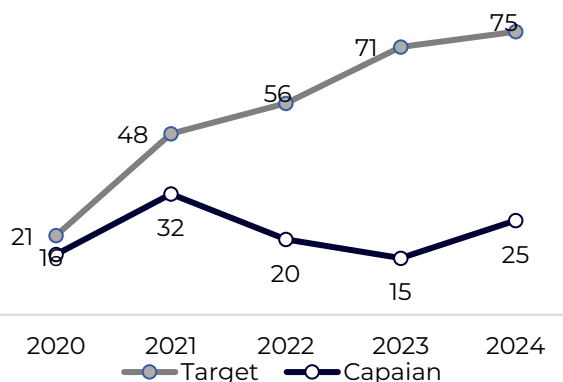




Capaian kinerja jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar pada tahun 2024, berdasarkan perjanjian kinerja, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2023). Pada tahun 2024, terdapat 25 operasi pembalakan liar, tumbuhan, dan satwa liar yang dilaksanakan di wilayah kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas upaya penegakan hukum dan pengawasan yang lebih baik dalam menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kerja Tahun 2023-2024

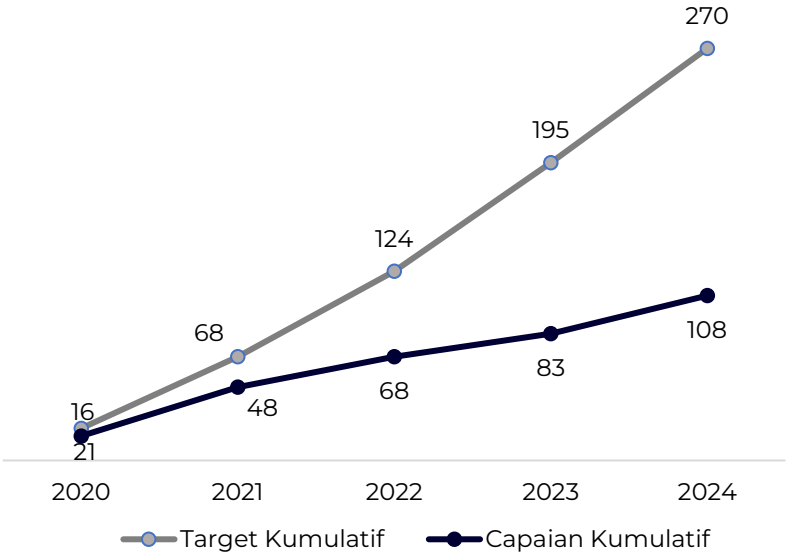
Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian pengrusakan hutan serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan menjadi prioritas utama di wilayah Sulawesi. Pada tahun 2024, BPPHLHK Wilayah Sulawesi melaksanakan serangkaian operasi pembalakan liar dan penegakan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di berbagai lokasi strategis, seperti pelabuhan, bandara, serta titik transit lainnya di seluruh wilayah Sulawesi. Operasi-operasi ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan terhadap sumber daya alam dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kawasan hutan.



Capaian Kinerja Tahunan berdasarkan Renstra



Secara kumulatif, target pelaksanaan operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024 adalah sebanyak 270 operasi. Namun, hingga Desember 2024, BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah berhasil melaksanakan 108 operasi, yang mencerminkan pencapaian sebesar 40% dari target yang ditetapkan. Meskipun capaian ini belum sepenuhnya memenuhi target yang diharapkan, hal ini tetap menunjukkan upaya yang signifikan dalam memperkuat penegakan hukum kehutanan. Ke depan, diharapkan adanya evaluasi dan penyempurnaan strategi operasional agar jumlah operasi yang dilaksanakan dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di wilayah Sulawesi. Capaian ini juga menunjukkan komitmen BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam menghadapi tantangan besar di sektor kehutanan, meskipun masih perlu dilakukan penguatan dalam aspek koordinasi, sumber daya, dan alokasi anggaran untuk mencapai target yang optimal.



Capaian Kumulatif Kinerja berdasarkan Renstra



KENDALA DAN UPAYA

Kinerja pada IKK Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar pada tahun 2024 dapat mencapai target dikarenakan faktor sebagai berikut:

1. Peran Pimpinan terutama Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi yang senantiasa memberikan arahan dan trigger kepada petugas pengamanan Polhut dan SPORC untuk menindak tegas setiap pelaku tindak pidana di dalam dan luar kawasan hutan.
2. Kinerja dan kecekatan Tim Puldasi dalam mendeteksi, menganalisis dan menyajikan data dan informasi peredaran hasil hutan dan satwa liar kepada pimpinan dalam rangka pencegahan dan pengamanan hutan.
3. Tingginya animo masyarakat untuk menyampaikan pengaduan tentang kejahatan TSL dan pengrusakan lingkungan yang terjadi di wilayah kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

Capaian Operasi Pembalakan Liar dan TSL di Seksi Wilayah Tahun 2024



Kendala

Meskipun capaian target IKK Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar dinilai telah memenuhi target, namun secara substantif maupun teknis dalam pelaksanaan masih menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Semakin meningkatnya modus kejahatan TSL dan maraknya pengrusakan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai untuk melaksanakan operasi peredaran TSL untuk mengungkap dengan cepat pelaku-pelaku kejahatan.
2. Tenaga pengamanan hutan, terutama Polhut dan SPORC masih terbatas baik secara kuantitas maupun peningkatan Skill yang dimiliki bila dibandingkan dengan kompleksitas kejahatan TSL dan kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang ada.

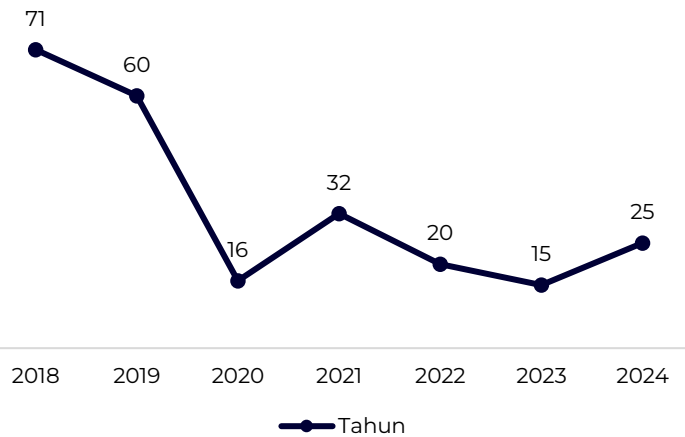


Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2025, yaitu antara lain:

1. Untuk optimalisasi pelaksanaan operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar perlu mengupayakan percepatan pelaksanaan pencairan dan ketersediaan dana agar implementasi kegiatan dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai penjadwalan yang telah direncanakan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penanganan kejahatan TSL yang semakin masif dengan berbagai modus.
3. Perlu kajian komprehensif untuk menentukan titik-titik rawan terjadinya peredaran hasil hutan dan TSL illegal.

CAPAIAN OPERASI PEMBALAKAN LIAR DAN TSL TAHUN 2018 - 2024



NILAI EFISIENSI



Efisiensi

0,68

Efisien



Persentase Realisasi Anggaran IKK 2 (input)

99,99%



Persentase Capaian IKK 2 (output)

147,06%

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1.185.542.000	1.185.410.710	99,99
Operasi Pembalakan Liar	1.520.732.000	1.520.677.040	100
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	913.010.000	913.009.580	100
Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	787.325.310	787.318.310	100
Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	673.121.000	672.768.664	99,95
Total	5.079.730.000	5.079.184.304	99,99





JUMLAH POLHUT YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA

IKK
3

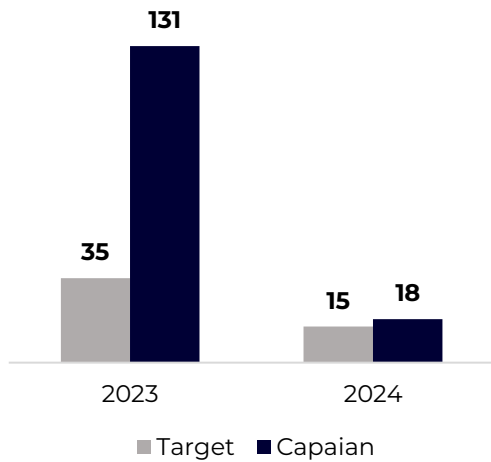
Tantangan kompleksitas kejahatan kehutanan yang semakin tinggi memerlukan adanya sumber daya manusia yang handal di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat Pengamanan Hutan (Polhut) menjadi sangat penting untuk memperkuat upaya penanggulangan kejahatan kehutanan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pada tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan rutin berupa pelatihan menembak, penyegaran Polhut dan Uji Kompetensi yang diikuti oleh para Polhut lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi.



Target Peningkatan Kapasitas Polhut berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah sebanyak 15 Orang.

Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan pada tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan operasional para Polhut, khususnya dalam menghadapi situasi yang memerlukan keterampilan yang profesional. Diharapkan, dengan peningkatan kemampuan ini, Polhut dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di lapangan, sehingga dapat menekan angka kejahatan kehutanan yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapsiagaan para Polhut dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada di lapangan. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 18 orang, maka dengan kata lain dapat dikatakan pencapaian realisasi kinerja yang dimaksud adalah sebesar 120,00%.





Capaian kinerja jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2024, berdasarkan perjanjian kinerja mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2023), yaitu sebanyak 18 orang Polhut lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kerja Tahun 2023-2024

Pelaksanaan peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan (Polhut) pada tahun 2024 telah dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh Polhut dan SPORC di bawah lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengamanan dan penegakan hukum kehutanan.

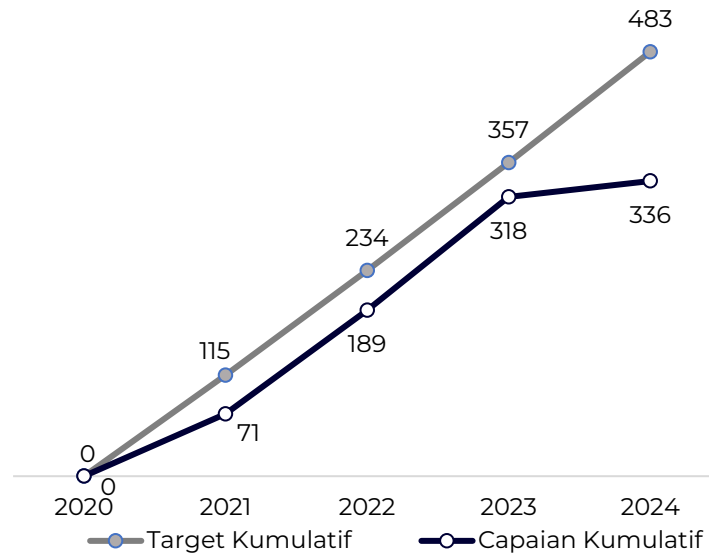
Peningkatan kapasitas ini mencakup berbagai bentuk pelatihan dan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan teknis di lapangan, pelatihan penanganan konflik, hingga keterampilan taktis yang mendukung keberhasilan tugas mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Polhut dalam menghadapi tantangan dan dinamika kejahatan kehutanan yang semakin kompleks.



Capaian Kinerja Tahunan berdasarkan Renstra



Secara kumulatif, total capaian pelaksanaan peningkatan kapasitas Polhut sepanjang periode target Renstra 2020–2024 telah berhasil mencakup sebanyak 336 orang.



Capaian Kumulatif Kinerja berdasarkan Renstra

Selain peningkatan kapasitas berupa Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi Polhut yang rutin dilaksanakan setiap tahun, pada tahun 2024 juga Polhut BPPHLK Wilayah Sulawesi telah mengikuti peningkatan kapasitas Polhut lainnya yang mendukung pencapaian IKK Peningkatan Kapasitas POLHUT melalui kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Polhut	Lokasi Kegiatan
1.	Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Pelatihan Investigasi Pencucian Uang Kejahatan SDA-LH	28 Januari - 2 Februari 2024	1 Orang	DKI Jakarta
2.	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 1 Tahun 2024	3 – 7 Juni 2024	17 Orang	BPLHK Makassar



KENDALA DAN UPAYA

Kinerja pada IKK Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2024 dapat mencapai target dikarenakan semakin masifnya permasalahan kasus kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan mendorong Polhut lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi untuk lebih meningkatkan keahlian sehingga lebih berkompeten dalam menindaki permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kendala

Meskipun capaian target IKK Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya dinilai telah memenuhi target, namun secara substantif maupun teknis dalam pelaksanaan masih menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Polhut yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.
2. Kompetensi Polhut lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi belum merata sehingga terkendala dalam penyelesaian penanganan berbagai tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Anggaran peningkatan kapasitas Polhut yang terbatas
4. Tenaga pengamanan hutan, terutama Polhut dan SPORC masih terbatas baik secara kuantitas maupun peningkatan Skill yang dimiliki bila dibandingkan dengan kompleksitas kejahatan TSL dan kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang ada.



Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2025, yaitu antara lain:

1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas Polhut melalui berbagai pelatihan sehingga tantangan terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dapat lebih cepat tertangani.
2. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih canggih sesuai dengan tuntutan di era digital seperti saat ini.

NILAI EFISIENSI



Efisiensi

0,83

Efisien



Persentase
Realisasi Anggaran IKK 3
(input)

100%



Persentase
Capaian IKK 3
(output)

120%

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	200.000.000	199.995.278	100
Total	200.000.000	199.995.278	100





**THANK
YOU
FOR
YOUR
ATTENTION!!!**

www.fight-sengketa.com



FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

SALAH PENERIMAAN DAN PEKERJAAN BUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEHATAN WILAYAH SULAWESI
BERGASA
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN HUBUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



JUMLAH PERKARA SENKETA LINGKUNGAN HIDUP YANG DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN



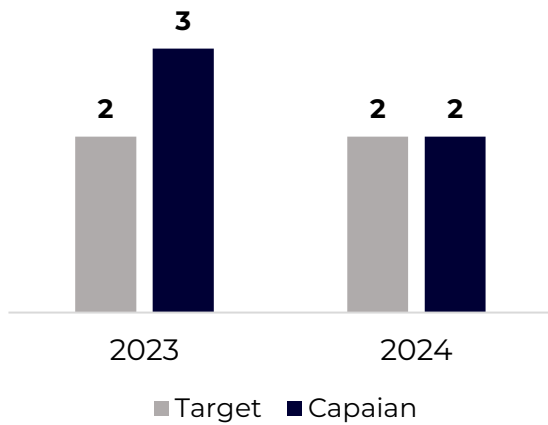
Tahun 2024 adalah tahun kedua dimana BPPHLHK Wilayah Sulawesi mendapatkan tugas baru yaitu **Penyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)** melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada tahun ini BPPHLHK Wilayah Sulawesi masih mendapatkan target yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu mampu menyelesaikan 2 perkara sengketa lingkungan hidup.

PSLH melalui pengadilan dan di luar pengadilan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari aktivitas/kegiatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian, baik kerugian lingkungan hidup maupun kerugian langsung masyarakat.



BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada tahun 2024 mampu menyelesaikan **2 Perkara** Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dari target IKK dalam Perjanjian Kerja 2024 sebanyak **2 Perkara** atau sebesar **100%**.





Selama periode kerja tahun 2023 hingga 2024, BPPHLHK Wilayah Sulawesi selalu mencapai target berdasarkan Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 mampu menyelesaikan **3 Perkara** Sengketa Lingkungan Hidup dan pada tahun 2024 mampu menyelesaikan **2 Perkara** Sengketa Lingkungan Hidup.

Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kerja Tahun 2023-2024

Perkara yang berhasil diselesaikan BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada Tahun 2024 yaitu:

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Penyelesaian	Kesepakatan Ganti Rugi
1	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Perairan Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara akibat Tumpahan Ore Nikel dari Kapal BG Marine Power 3009 yang Ditarik TB ITS Ruby	Kelompok Nelayan Sumber Laut Desa Boenaga	PT Gerbang Multi Sejahtera, PT Marindo Jaya Sejahtera dan PT Manna Samudra Perkasa	Fasilitasi di Luar Pengadilan	Rp.294.400.000,-
2	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Perairan Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara akibat Tumpahan Ore Nikel dari Kapal BG Marine Power 3009 yang Ditarik TB ITS Ruby	Perhimpunan Masyarakat Nelayan Sinar Mutiara Desa Boedingi	PT Gerbang Multi Sejahtera, PT Marindo Jaya Sejahtera dan PT Manna Samudra Perkasa	Fasilitasi di Luar Pengadilan	Rp.136.800.000,-



Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) di Luar Pengadilan

merupakan proses panjang yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Adanya permohonan/gugatan ganti kerugian lingkungan hidup dan/atau kerugian langsung masyarakat atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas/kegiatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
2. Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dengan menghadirkan Ahli-Ahli yang dapat menentukan kebenaran terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup .
3. Pertemuan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dimana akan disimpulkan terjadi atau tidak terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta jalur penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang akan ditempuh oleh para pihak yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
4. Perhitungan besaran nilai kerugian terhadap lingkungan hidup dan/atau kerugian langsung masyarakat oleh Ahli.
5. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sesuai jalur penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa.
6. Keputusan Kesepakatan atau Ketidaksepakatan.





1. Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup



2. Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup dan Perhitungan Kerugian



3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



4. Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



5. Penyerahan Ganti Kerugian Langsung Masyarakat



KENDALA DAN UPAYA

Pencapaian target Kinerja pada IKK 4 pada tahun 2024 yaitu jumlah perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya dukungan Ahli yang kompeten sesuai pada bidangnya dan dukungan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sehingga dapat efektif, efisien dan berjalan dengan lancar.
2. Kinerja ASN BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam melakukan fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang baik.

Kendala

Dalam proses pencapaian target IKK 4 yaitu jumlah perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan terdapat beberapa kendala baik kendala substantif maupun teknis yang dialami, yaitu antara lain:

1. Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang cukup lama karena harus melalui beberapa tahapan dan beberapa kali pertemuan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memahami proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2025, yaitu antara lain:

1. Melakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
2. Memperbanyak kegiatan *sharing session* untuk membuka wawasan terkait Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan dengan Direktorat PSLH maupun instansi lain yang menangani sengketa lingkungan hidup.



NILAI EFISIENSI



Efisiensi



Persentase
Realisasi Anggaran IKK 4
(input)



Persentase
Capaian IKK 4
(output)

Blokir AA dan
selfblocking

0,82
Efisien

82,2%

100%

Non Blokir AA
dan *selfblocking*

0,99
Efisien

99,88%

100%

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	Non Blokir AA dan <i>selfblocking</i>		Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	Non Blokir AA dan <i>selfblocking</i>
Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	193.828.000	193.828.000	193.360.545	99,76	99,76
Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat	20.000.000	0	0	0,00	0,00
Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	256.172.000	192.988.000	192.984.705	75,33	100
Total	470.000.000	386.816.000	386.345.250	82,20	99,88




FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI BERSAMA
 DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



JUMLAH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LHK

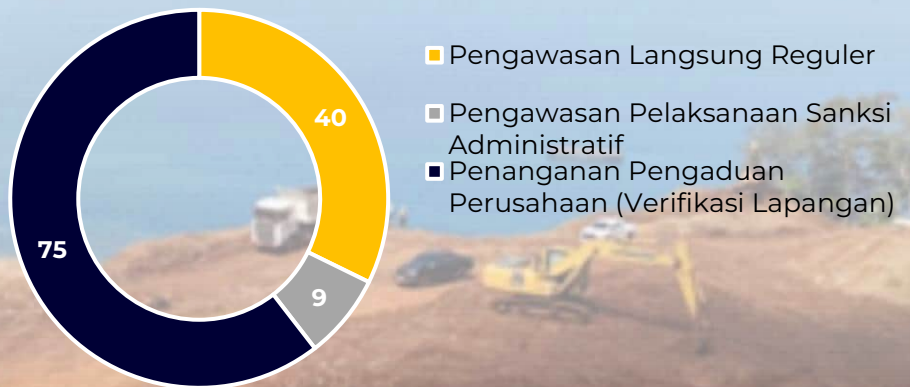


Pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan, serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup maupun kehutanan. Pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

Sepanjang tahun 2024, BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah melakukan pengawasan terhadap 124 badan usaha yang tersebar di 6 provinsi di Sulawesi. Jumlah tersebut telah melampaui target IKK dalam Perjanjian Kerja tahun 2024 yaitu 111 badan usaha. Badan usaha tersebut diawasi melalui komponen kegiatan Pengawasan Bidang LHK yaitu pengawasan langsung (reguler) dan pengawasan pelaksanaan sanksi administratif, serta Penanganan Pengaduan Perusahaan.



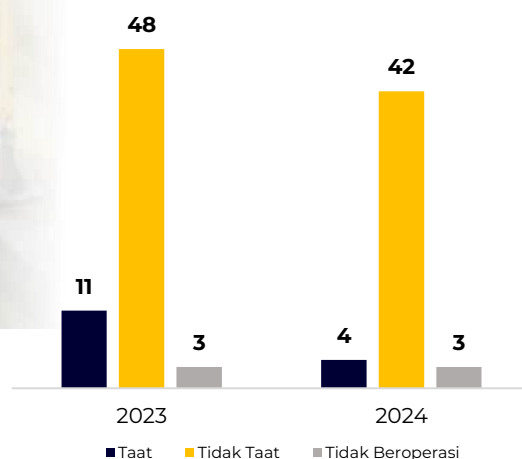
Jumlah Badan Usaha Yang Diawasi Tiap Komponen Kegiatan



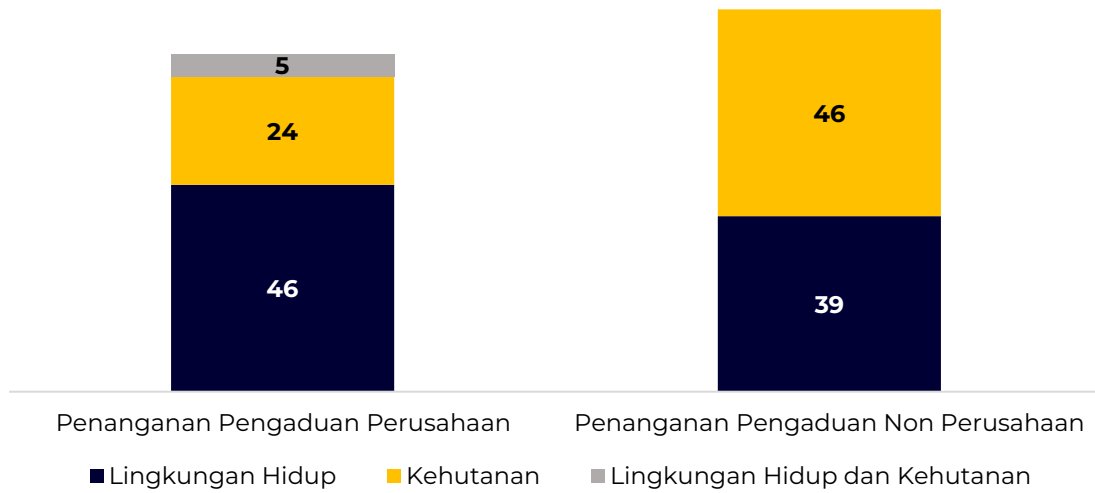


Pengawasan bidang LHK berupa pengawasan langsung (reguler) dan pengawasan pelaksanaan sanksi administratif dilakukan terhadap 49 badan usaha. Berdasarkan hasil pengawasan, sebanyak 42 badan usaha berstatus tidak taat, 4 berstatus taat, sementara 3 lainnya sudah tidak beroperasi. Terhadap badan usaha yang dinyatakan tidak taat, BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah merekomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau paksaan pemerintah. Pemberian sanksi administratif pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Tingkat Ketaatan Badan Usaha Pada Pengawasan Bidang LHK Periode 2023-2024



Kategori Pengaduan Yang Diterima oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2024



Komponen kegiatan lain dalam IKK 5 adalah penanganan pengaduan. Penanganan pengaduan diawali dengan tahapan penerimaan pengaduan melalui berbagai kanal pengaduan yang telah disediakan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Selanjutnya, pengaduan yang diterima akan ditelaah untuk menentukan apakah pengaduan tersebut merupakan kewenangan BPPHLHK Wilayah Sulawesi atau bukan. Dari 75 pengaduan perusahaan yang diterima, 11 diantaranya bukan kewenangan BPPHLHK Wilayah Sulawesi sehingga telah dilimpahkan ke instansi terkait. Selanjutnya, 64 pengaduan yang menjadi kewenangan BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah ditindaklanjuti melalui kegiatan verifikasi lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi, 47 pengaduan dinyatakan terbukti sehingga BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah memberikan usulan rekomendasi berupa penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pengumpulan bahan dan keterangan, atau pun pelimpahan ke sector lain.

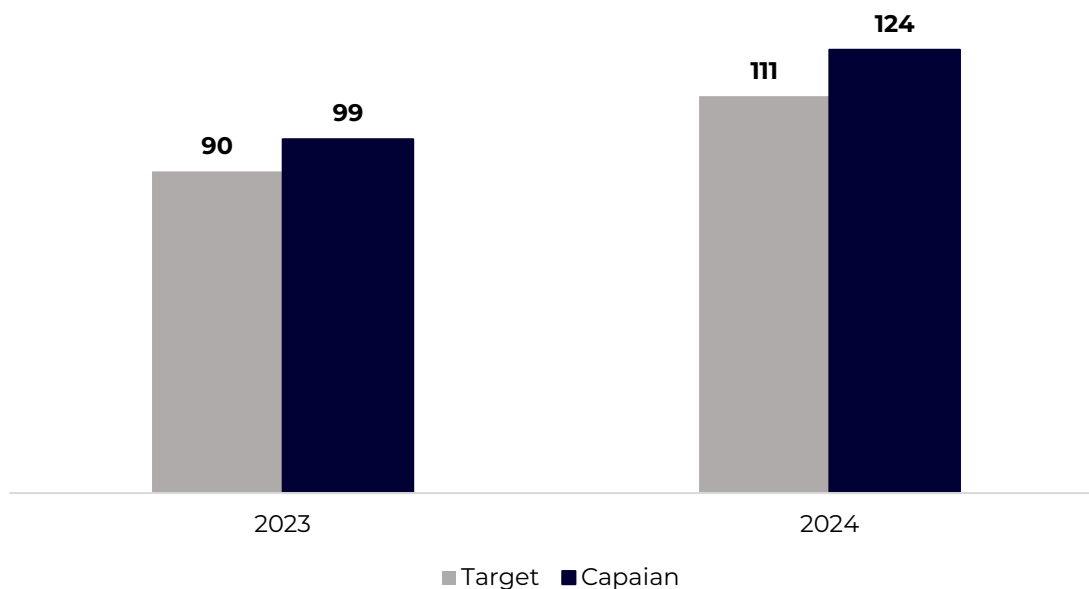




Pengaduan yang diterima oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi tidak hanya terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa diantaranya merupakan aduan atas dugaan pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh orang perseorangan, instansi pemerintah, atau organisasi. Pengaduan tersebut dikategorikan dalam Pengaduan Non Perusahaan. Selama tahun 2024, BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah menindaklanjuti sebanyak 85 pengaduan non perusahaan yang terbagi atas 46 pengaduan terkait kehutanan dan 39 pengaduan terkait lingkungan hidup.



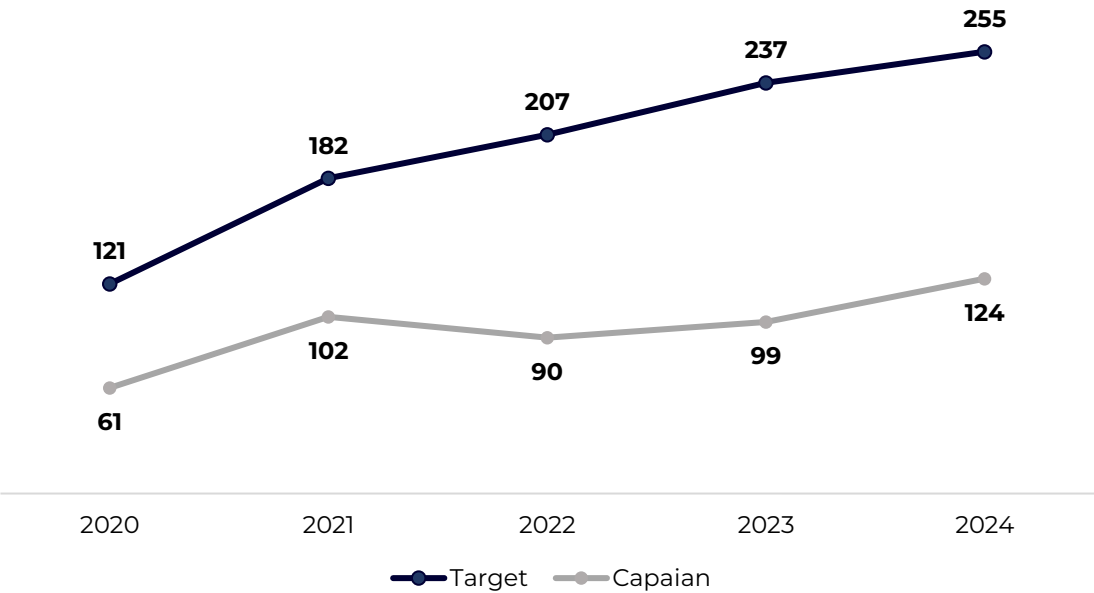
Dalam rentang tahun 2023 hingga 2024, target jumlah badan usaha yang diawasi selalu meningkat tiap tahunnya. Selama periode tersebut BPPHLHK Wilayah Sulawesi selalu mampu melampaui target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2024 mencapai 124 badan usaha, meningkat sekitar 25% dibanding pencapaian tahun sebelumnya yaitu 99 badan usaha.



Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kerja Tahun 2023-2024



Target RENSTRA BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2020 – 2024 untuk IKK 5 adalah sebanyak 1.002 badan usaha. Hingga tahun 2024, total badan usaha yang telah diawasi mencapai 476 badan usaha atau 47,5% dari total target yang diberikan.



Capaian Kinerja Tahunan berdasarkan Renstra



KENDALA DAN UPAYA

Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK dapat mencapai target disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Telah terbangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan instansi lingkungan hidup dan kehutanan di daerah sehingga meningkatkan tingkat partisipasi dalam menyampaikan pengaduan kepada BPPHLHK Wilayah Sulawesi.
2. Meningkatnya jumlah pengaduan dari masyarakat umum melalui berbagai kanal pengaduan yang disediakan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi.
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risik membuat semakin banyak Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pengawasannya berada pada Pemerintah Pusat.

Kendala

Dalam proses pencapaian target IKK 5 terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Jumlah PPLH yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah badan usaha yang diawasi.
2. Belum meratanya kapasitas PPLH dalam beberapa kompetensi yang dapat menunjang kegiatan pengawasan seperti pemetaan, penggunaan drone, dan pengambilan sampel air dan tanah.

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2025, yaitu antara lain:

1. Meningkatkan kualitas PPLH melalui pemberian pelatihan teknis atau peningkatan kapasitas.
2. Memperbanyak sosialisasi cara melakukan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan kepada instansi pemerintah maupun masyarakat secara umum.



NILAI EFISIENSI



Efisiensi



Persentase Realisasi Anggaran IKK 5 (input)



Persentase Capaian IKK 5 (output)

Blokir AA dan selfblocking	0,87 Efisien	98,10%	111,71%
----------------------------	------------------------	---------------	----------------

Non Blokir AA dan selfblocking	0,89 Efisien	99,99%	111,71%
--------------------------------	------------------------	---------------	----------------

Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	Blokir AA dan selfblocking	Non Blokir AA dan selfblocking		Blokir AA dan selfblocking	Non Blokir AA dan selfblocking
Penanganan Pengaduan Perusahaan	1.033.495.000	1.033.495.000	1.033.488.406	100	100
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	178.137.000	178.137.000	178.106.930	99,98	99,98
Pengawasan Bidang LHK	1.438.368.000	1.388.368.000	1.388.075.926	96,50	99,98
Total	2.650.000.000	2.600.000.000	2.599.671.262	98,10	99,99



JUMLAH KASUS PIDANA LHK YANG DISELSAIKAN SAMPAI DENGAN P-21

IKK
6

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPPHLHK Wilayah Sulawesi mengemban tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 menjadi bagian dari IKK tahun 2024. BPPHLHK Wilayah Sulawesi kemudian mampu mewujudkan hasil yang diharapkan melalui kegiatan berupa : 1). Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK; 2). Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK; 3). Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK; 4). dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK.



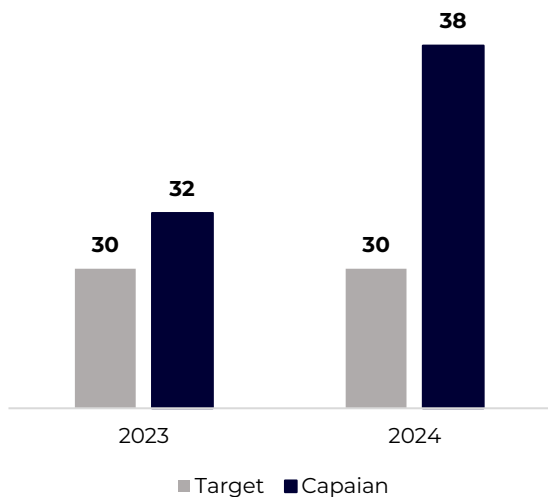
Dalam Perjanjian Kinerja, jumlah target kasus yang diselesaikan tahun 2024 sampai dengan P-21 adalah sebanyak 30 kasus LHK. Adapun capaian jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi adalah sebanyak 38 kasus LHK. Sehingga realisasi capaian yang diperoleh adalah sebanyak 126,67 %.

DILARANG MELINTAS
PPNS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DO NOT CROSS
ENVIRONMENT AND FOREST INVESTIGATOR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGAWASAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

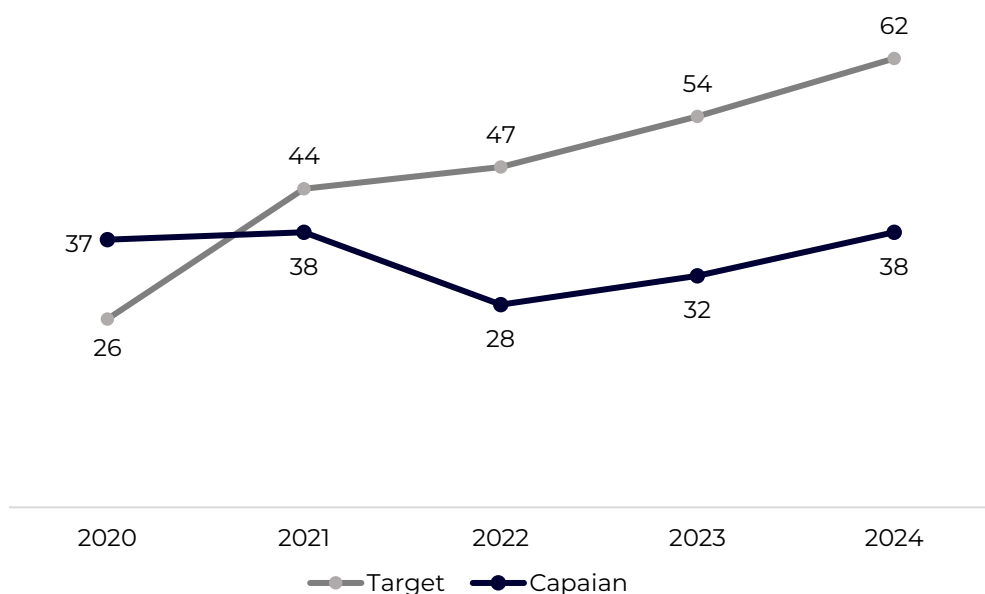




Capaian perjanjian kinerja penyelesaian kasus tindak pidana LHK sampai dengan P-21 mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 32 kasus yang kemudian meningkat menjadi 38 kasus dengan selisih peningkatan sebanyak 6 kasus.

Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kerja Tahun 2023-2024

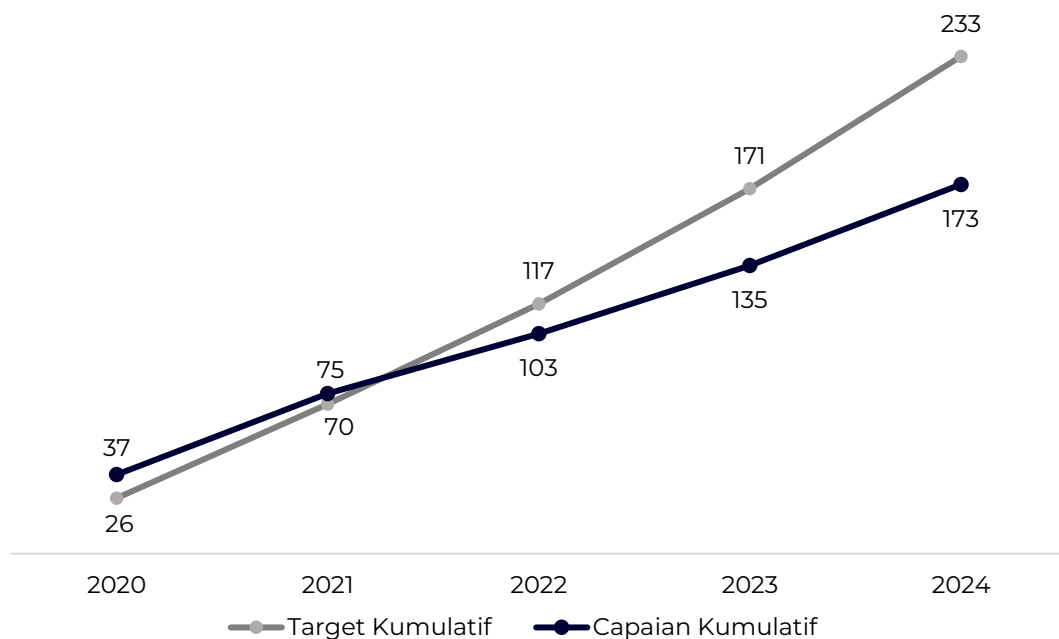
Capaian rencana strategis (Renstra) penyelesaian kasus tindak pidana LHK sampai dengan P-21 jika dibandingkan dengan target tahunan pada Renstra memiliki selisih yang cukup jauh dimana target pada tahun 2024 sebanyak 62 kasus LHK sedangkan BPPHLHK Wilayah Sulawesi berhasil menyelesaikan sebanyak 38 kasus LHK yang terus meningkat jumlahnya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.



Capaian Kinerja Tahunan berdasarkan Renstra



Secara kumulatif, capaian target Renstra tahun 2020-2024 terkait penyelesaian kasus tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan hingga mencapai tahap P-21 pada tahun 2024 adalah sebanyak 233 kasus. Berdasarkan capaian hingga Desember 2024, BPPHLHK Wilayah Sulawesi berhasil menyelesaikan 173 kasus atau mencapai 74,25% dari target tersebut. Jika dibandingkan dengan capaian Renstra 2016-2019 dengan jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 sebanyak 84 kasus terjadi peningkatan hingga 105,95% atau meningkat sebanyak 89 kasus.



Capaian Kumulatif Kinerja berdasarkan Renstra

Pada tahun 2024, BPPHLHK Wilayah Sulawesi berhasil menyelesaikan kasus LHK sampai dengan tahap P-21 sebanyak 38 kasus yang tersebar di 6 provinsi pelayanan yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Dari hasil yang dicapai, terdapat 4 tipologi kasus yang berhasil diselesaikan yaitu Pembalakan Liar sebanyak 12 kasus, Peredaran Tumbuhan & Satwa Liar sebanyak 4 kasus, Perambahan dan Perusakan Hutan sebanyak 21 kasus, serta kasus Lingkungan Hidup sebanyak 1 kasus.





Proses penegakan hukum tidaklah mudah, pada praktiknya BPPHLHK Wilayah Sulawesi menghadapi adanya gugatan prapradilan dari tersangka. Selama tahun 2024 sendiri, telah dilakukan sidang praperadilan sebanyak 9 kasus dengan daftar sebagai berikut :

No.	Tipologi	Pemohon	Lokasi PN	Gugatan	Keterangan
1	Pencemaran Lingkungan	Sdr. SHA.	PN.Toli-Toli	1. Sah atau Tidaknya Penangkapan 2. Sah atau Tidaknya Penahanan 3. Rehabilitasi	Permohonan ditolak (Menang)
2	Pembalakan Liar	Sdr.E , Sdr. A dan Sdr. F.	PN Palu	1. Sah atau Tidaknya Penangkapan 2. Sah atau Tidaknya Penahanan 3. Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka 4. Rehabilitasi	Permohonan ditolak (Menang)
3	Pembalakan Liar	Sdr. HP.	PN Tondano	1. Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka 2. Sah atau Tidaknya Penyitaan 3. Ganti Rugi	Permohonan ditolak (Menang)



No.	Tipologi	Pemohon	Lokasi PN	Gugatan	Keterangan
4	Perambahan Hutan	Sdr. IBH dan Sdr. ED	PN. Malili	1. Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka 2. Rehabilitasi	Permohonan ditolak (Menang)
5	Perambahan Hutan	Sdr. HI.	Palu	1. Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka 2. Penangkapan 3. Penahanan 4. Penyidikan 5. Ganti Rugi dan Rehabilitasi	Permohonan Gugur (Menang)
6	Pembalakan Liar	Sdr. K. dan Sdr. S.	PN.Mamuju	1. Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka 2. Penangkapan 3. Penyidikan 4. Ganti Rugi	Permohonan Diterima (Kalah)
7	Pembalakan Liar	Sdr. YYK.	PN. Palu	1. Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka 2. Penangkapan 3. Penyidikan 4. Penahanan 5. Penyitaan	Permohonan Diterima (Kalah)
8	Pembalakan Liar	Sdr.MR.	PN. Limboto	1. Penyidikan 2. Penyitaan 3. Ganti Rugi	Permohonan Ditolak (Menang)
9	Pembalakan Liar	Sdr. FS.	PN Makassar	1. Penyidikan 2. Penyitaan	Permohonan Dicabut (Menang)



Memahami adanya tantangan dalam penegakan hukum, BPPHLHK Wilayah Sulawesi berupaya untuk terus mendorong kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi mendukung upaya penegakan hukum yang akan dilakukan. Pada tahun 2023 BPPHLHK Wilayah Sulawesi melakukan 4 (empat) Perjanjian Kerjasama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

NO	NO SURAT	URAIAN	PIHAK
1	PKS.2/BPPHLHK.3/TU/Gkm.2/5/2023 574/UN4.16/HK.07.00/2023	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan di Sulawesi	Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
2	W.25.UM.01.01-5763 PK.4/BPPHLHK.3/TU/7/2023	Kerjasama Penitipan Tahanan dan Barang Bukti	Divisi Pemasarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara
3	PKS.9/BPPHLHK.3/SW-I/SET.0/9/2023 W27.PAS.PAS11.HH.04.05-08 Tahun 2023	Kerja Sama Penyelenggaraan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari
4	W24.PAS.PAS.10.TI.04.02836 PKS.12/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/10/2023	Kerja Sama dalam bidang Pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran)	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu







Dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan, pada tahun 2024 BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus oleh aparat penegak hukum lainnya. Fasilitasi diberikan dalam bentuk penyediaan ahli dalam tahap penyidikan atau persidangan dan dalam bentuk anggaran penyidikan.



Pengungkapan kasus hingga P.21 merupakan kerjasama antara SPORC, PPNS, dan dukungan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Pada tahun 2024, BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah berhasil mengungkapkan kasus

tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dimulai dari pelaksanaan operasi, pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), penanganan barang bukti, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, serta penyidikan yang ditunjukkan dengan kerja cepat dan profesional penyidik mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan.





KENDALA DAN UPAYA

Beberapa faktor yang mendukung terlampaihnya target IKK jumlah kasus LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Penegakan Hukum Berbasis Struktur dan Kolaborasi

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi memiliki instrumen penegakan hukum yang didukung oleh tenaga ahli dan profesional di bidangnya. Salah satu keunggulan struktural adalah keterlibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tidak bekerja secara individu, melainkan mendapatkan dukungan operasional yang signifikan dari Unit Intelijen dan Unit Operasi. Keberadaan kedua unit ini sangat penting dalam memberikan kontribusi strategis dan teknis yang memperkuat penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan secara lebih efektif dan efisien di wilayah Sulawesi.

2. Pentingnya Sarana, Prasarana, dan Dukungan Anggaran

Keberhasilan penyidikan kasus di BPPHLHK Wilayah Sulawesi tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta alokasi anggaran yang mencukupi. Fasilitas ini memastikan bahwa setiap proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar prosedur operasional, sehingga memberikan hasil yang optimal dalam penanganan kasus.



3. Peran Kepemimpinan yang Visioner dan Inspiratif

Kepala Balai memegang peranan penting dalam mengarahkan dan memotivasi PPNS serta seluruh tim yang terlibat. Kepemimpinan yang strategis ditunjukkan melalui pemberian arahan yang jelas, pendampingan yang konsisten, dan dorongan moral kepada PPNS untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, Kepala Balai secara aktif terlibat dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak terkait melalui koordinasi dan kerja sama lintas sektoral yang kuat, sehingga menciptakan ekosistem kerja yang kolaboratif.

4. Pendekatan Proses Penanganan Kasus yang Sistematis

Proses penanganan kasus di BPPHLHK Wilayah Sulawesi diimplementasikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja yang terorganisir dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kecepatan dalam respons, ketepatan dalam penangkapan, penyelesaian yang menyeluruh, keberlanjutan proses, serta konsistensi dalam penegakan hukum. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Balai terhadap kualitas dan profesionalisme dalam penanganan tindak pidana di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

5. Sinergi Aktif dengan Pemangku Kepentingan yang Beragam

Keberhasilan penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Sulawesi juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kepolisian, Kejaksaan, dan ahli terkait memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat proses penyidikan dan penyelesaian kasus. Dukungan dan kerja sama yang harmonis antara berbagai pihak ini menjadi landasan penting bagi kelancaran dan keberhasilan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



Kendala

Meskipun jumlah target IKK jumlah kasus pidana LHK yang berhasil diselesaikan sampai dengan P-21 dapat melebihi target yang ditetapkan, namun masih ditemukan beberapa hambatan dalam segi teknis maupun substantif, Adapun hal tersebut berupa :

1. Kebutuhan akan Perbaikan untuk Meningkatkan Kinerja Penanganan Kasus

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih diperlukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan untuk meningkatkan kinerja utama, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup. Kasus-kasus tersebut sering kali menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kasus tindak pidana kehutanan. Kesulitan ini terutama terlihat dalam pembuktian materil, yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, matang, dan efektif guna memastikan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

2. Hambatan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan terkadang dihadapkan pada kendala terkait dengan kedudukan saksi dan pelaku. Hal ini sering kali memerlukan alokasi waktu dan anggaran yang lebih besar, sehingga mengurangi efisiensi dan kecepatan dalam penanganan kasus. Hambatan tersebut menuntut strategi yang lebih inovatif untuk memastikan kelancaran proses hukum tanpa mengorbankan kualitas hasilnya.

3. Kesulitan dalam Penanganan Barang Bukti

Barang bukti yang sering kali berada di lokasi terpencil atau sulit dijangkau oleh kendaraan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses penyidikan. Kondisi ini memperumit proses pemindahan dan pengamanan barang bukti, yang pada gilirannya dapat menghambat kelancaran dan kecepatan dalam penyelesaian kasus. Penanganan yang lebih sistematis dan dukungan logistik yang memadai diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.



4. Dampak Perubahan Kebijakan dan Regulasi terhadap Penegakan Hukum

Perubahan kebijakan atau regulasi yang kerap terjadi menciptakan tantangan baru dalam proses penegakan hukum. Perubahan tersebut memerlukan respons yang cepat dan adaptasi yang tepat oleh para pihak yang terlibat, termasuk penguasaan pemahaman terhadap peraturan baru. Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan panduan operasional yang mampu menjembatani implementasi kebijakan dengan kebutuhan di lapangan.

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang Melibatkan Seluruh Pihak Terkait

Untuk mendukung penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup, penting untuk melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak atau instansi terkait. Koordinasi ini bertujuan untuk memperlancar sinergi, memperoleh dukungan, dan memastikan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan yang berkompeten. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, memperjelas tanggung jawab, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus yang kompleks ini.

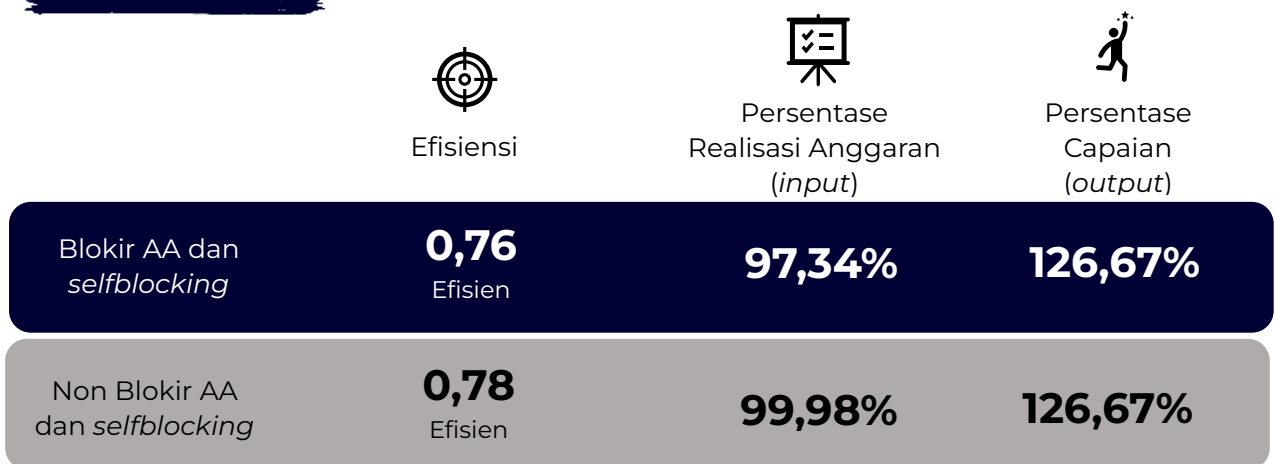
2. Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholder yang Beragam

Peningkatan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang relevan sangat diperlukan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Kolaborasi dengan instansi seperti Dinas Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum. Koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur akan memastikan adanya pemahaman yang sama, pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, serta sinergi dalam melaksanakan langkah-langkah penanganan kasus yang lebih efektif.



3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Kinerja dan Anggaran Penyidikan Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja serta anggaran penyidikan. Proses ini bertujuan untuk mengevaluasi progres, mengidentifikasi kendala yang timbul, dan mengukur sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui evaluasi yang teratur, dapat diambil langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas penanganan kasus serta memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan terarah.

NILAI EFISIENSI



Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	Blokir AA dan selfblocking	Non Blokir AA dan selfblocking		Blokir AA dan selfblocking	Non Blokir AA dan selfblocking
Pulbaket atas Dugaan Tindak Pidana LHK	1.655.382.000	1.655.382.000	1.655.295.477	99,99	99,99
Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	4.504.523.000	4.354.523.000	4.353.139.930	96,64	99,97
Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	573.074.000	526.784.000	526.769.494	91,92	100
Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK	388.734.000	388.734.000	388.682.580	99,99	99,99
Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana	319.667.000	319.667.000	319.658.345	100	100
Total	7.441.380.000	7.441.380.000	7.243.545.826	97,34	99,98





DITJEN PENEGAKAN HUKUM LHK
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



HILUX PATROL

B 3477 7900
1500



NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dilihat dari kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. NKA ini dapat merepresentasikan kualitas dalam penganggaran dan perbendaharaan pelaksanaan APBN. NKA ini dapat merepresentasikan kualitas dalam penganggaran dan perbendaharaan pelaksanaan APBN. Hasil perhitungan NKA di tingkat nasional juga menjadi dasar dalam penentuan kinerja kementerian/lembaga berdasarkan kategori pagu.

**Target IKK**

81 Poin

Capaian IKK

84,98 Poin

**Capaian Kinerja 104,91%**

Kinerja Perencanaan anggaran/EKA adalah suatu parameter untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan kinerja pelaksanaan anggaran/IKPA merupakan suatu parameter untuk mengukur kualitas dalam pelaksanaan belanja anggaran. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan pelaporan keuangan dijelaskan bahwa metode pengukuran NKA diperoleh dari penjumlahan 50% Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA dan 50% Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPPHLHK Wilayah Sulawesi tahun 2024 tercapai sebesar 84,94 poin atau 104,86% dari target 81,00 poin yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja. Nilai tersebut menurun dibandingkan dengan NKA yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 90,31 poin.

Pada tahun 2024, NKA BPPHLHK Wilayah Sulawesi adalah 84,94 poin yang terbentuk dari 50% Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 75,00 poin dan 50% Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 94,95 poin.



Sumber: MonevPA dan SMART DJA 10 Januari 2024

BPPHLHK Wilayah Sulawesi selama kurun waktu tahun 2024 telah berhasil melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yang diemban yaitu pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) melalui kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya berupa kegiatan jumlah layanan umum, jumlah layanan perkantoran serta jumlah layanan sarana internal. Berikut disajikan capaian masing-masing kegiatan yang mendukung terlaksananya IKK Nilai Kinerja Anggaran(NKA).

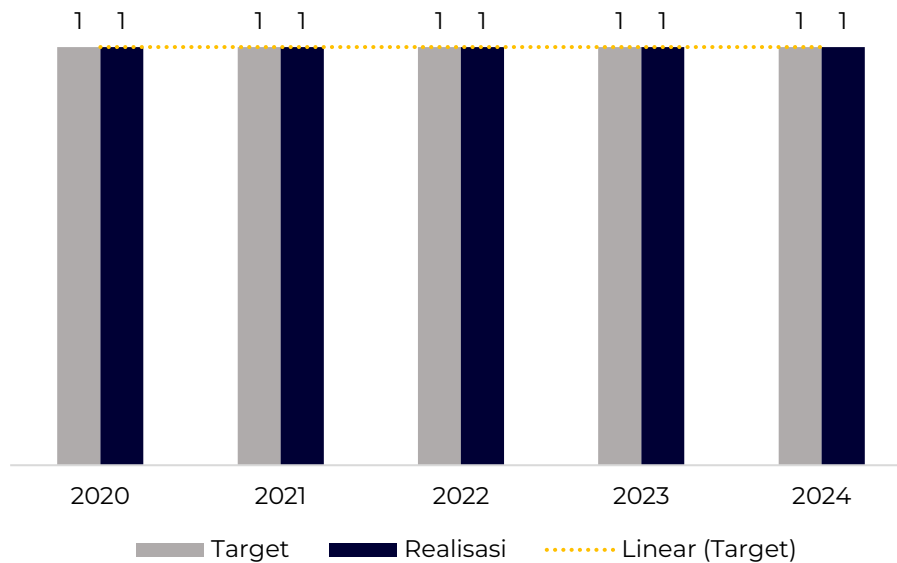


JUMLAH LAYANAN UMUM

Pencapaian output Layanan Umum tahun 2024 didukung oleh beberapa komponen kegiatan yaitu:

1. **Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran**
Capaian kegiatan komponen penyusunan program dan anggaran didukung oleh kegiatan sub komponen yaitu Penyusunan Pagu 2024, Penyusunan Pagu Indikatif 2024, Program dan anggaran ke wilayah kerja dan Penyusunan Rencana Kerja 2024.
2. **Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.**
Capaian kegiatan komponen pemantauan dan evaluasi didukung oleh kegiatan sub komponen yaitu Kunjungan Pimpinan Balai dalam rangka kinerja ke wilayah kerja dan Pengurusan dan pengelolaan administrasi BMN.
3. **Pengelolaan Keuangan**
Capaian kegiatan komponen pengelolaan keuangan didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain penyusunan laporan keuangan, Pembinaan keuangan ke wilayah kerja dan pelaksanaan SPIP.
4. **Pengelolaan Kepegawaian**
Capaian kegiatan komponen pengelolaan kepegawaian didukung oleh kegiatan sub komponen pelaksanaan uji kompetensi, pembinaan kepegawaian ke wilayah kerja, pengarusutamaan gender, dan penyelenggaraan Zona Integritas WBK dan WBBM, serta pengelolaan layanan dukungan manajemen lainnya





Capaian Kinerja Tahunan Layanan Umum berdasarkan Renstra

Dibandingkan dengan Renstra 2020 - 2024 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, target Renstra Layanan Umum Per tahun 2024 sebanyak 1 Layanan dan terealisasi sebanyak 1 Layanan atau sebesar 100% dari target Renstra 2020-2024.

Beberapa keluaran (Output) yang dihasilkan terhadap capaian IKK yaitu berupa dokumen program dan anggaran serta laporan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan diantaranya yaitu Laporan Keuangan dan BMN 2024, Dokumen SPIP Tahun 2024, Laporan Perdataan, Laporan Kepegawaian, Laporan Kinerja 2024, Laporan Survei Kepuasan Publik, Rencana Kerja 2024, Rencana Aksi 2024, RKA-KL 2024, ROK 2024, serta dokumen terkait lainnya.



JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN

Pencapaian output layanan perkantoran tahun 2024 didukung oleh beberapa komponen kegiatan yaitu:

1. Gaji dan Tunjangan

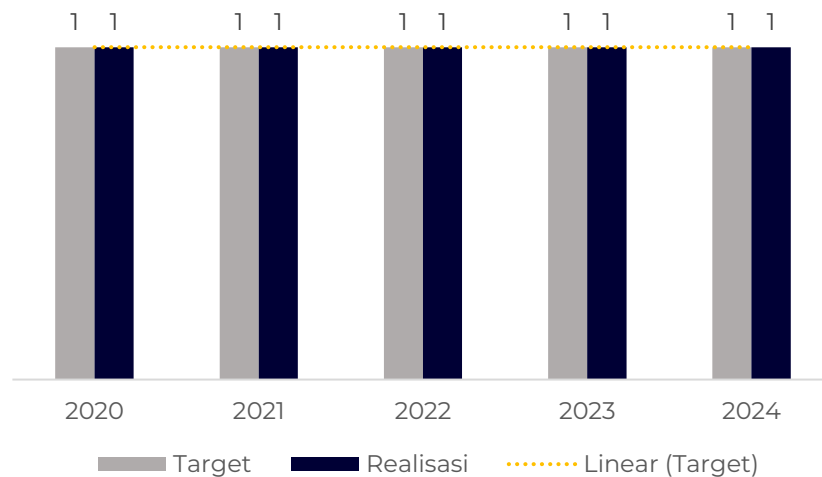
Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja dan uang makan pegawai lingkup Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi sebanyak 178 orang pegawai yang terdiri dari 168 orang PNS dan 10 orang PPPK.

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

a. Terselenggaranya dan terpenuhinya keperluan sehari-hari perkantoran berupa pembayaran Langganan Daya Jasa (pengiriman surat dinas, langganan listrik, langganan telepon, langganan air serta belanja sewa rumah jabatan);

b. Terselenggaranya pembayaran honorarium terkait operasional perkantoran berupa honorarium PPNPN sebanyak 8 orang, cleaning service Kontraktual dan security kontraktual sebanyak 10 orang serta pembayaran honorarium operasional satuan kerja.

c. Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan dan operasional kendaraan, pemeliharaan peralatan dan mesin serta kegiatan operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.



Capaian Kinerja Tahunan Layanan Perkantoran berdasarkan Renstra

Dibandingkan dengan Renstra 2020-2024 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, target Renstra Layanan Perkantoran tahun 2024 sebanyak 1 Layanan dan terealisasi sebanyak 1 Layanan atau sebesar 100% dari target Renstra 2020-2024.



JUMLAH LAYANAN SARANA INTERNAL

Pencapaian output sarana internal tahun 2024 didukung oleh beberapa komponen kegiatan yaitu:

1. Pengadaan kendaraan bermotor
2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
4. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan

Target Jumlah Sarana Internal berdasarkan Perjanjian kinerja adalah sebanyak 1 Unit. Jumlah Sarana Internal pada tahun 2024 sebanyak 1 Unit, maka dengan kata lain dapat dikatakan pencapaian realisasi kinerja yang dimaksud adalah sebesar 100%.

Beberapa keluaran (Output) yang dihasilkan terhadap capaian IKK Jumlah Sarana Internal tahun 2024 yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, sesuai dengan perkembangan teknologi serta dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi dan meningkatkan standar kualitas lingkungan kerja berupa:

- o Pembangunan/Renovasi gedung bangunan di kantor Balai, Seksi Wilayah dan Pos Gakkum LHK berupa pemeliharaan kantor Balai dan Seksi Wilayah serta Pembangunan Kantor Pos Gakkum LHK Gorontalo.
- o Pengadaan peralatan dan mesin untuk kantor Balai, Seksi Wilayah dan Pos Gakkum yaitu drone, laptop, teleconference meeting, printer, scanner, portable computer dan camera miroless.
- o Pengadaan kendaraan bermotor penunjang tugas dan fungsi berupa Pengadaan station wagon sebanyak 1 unit, mini bus (penumpang 14 orang kebawah) sebanyak 1 unit, mobil fungsional sebanyak 1 unit dan kendaraan bermotor roda dua operasional sebanyak 6 unit.
- o Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran untuk kantor Balai, Seksi Wilayah dan Pos Gakkum LHK yaitu lemari besi, multiparameter, air conditoning, dispenser, lemari arsip, dry box kamera, kursi rapat, meja rapat, meja rapat, sarana pengembangan Center of Intelegen.



KENDALA DAN UPAYA

Keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam pencapaian target IKK Nilai Kinerja Anggaran selama tahun 2024 didukung beberapa hal, antara lain:

1. Dukungan dan arahan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan terkait pengelolaan anggaran dan adanya dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan.
2. Dukungan sarana yang memadai serta pemanfaatan sarana berbasis teknologi dan informasi yang merupakan implementasi dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE yang telah diterapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memanfaatkan SPBE, organisasi pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi sistem informasi antar organisasi pemerintah mengelola sumber daya secara lebih bijak, dan merespons tantangan era digital dengan lebih adaptif.
3. Komitmen pimpinan untuk memberikan layanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan organisasi baik secara internal maupun eksternal berupa:
 - a. Penandatanganan kerjasama (MoU) dengan pihak JNE selaku penyedia jasa ekspedisi. Mou tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran dan juga mengefisienkan waktu khususnya pengiriman/korespondensi surat-surat dinas.
 - b. Pengembangan center of intellegence yang merupakan pusat kendali yang terintegrasi guna mendukung pengelolaan data, pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.
 - c. Penyediaan ruang layanan publik merupakan komitmen BPPHLHK Wilayah Sulawesi untuk memberikan pelayanan yang profesional, responsif, inklusif, transparan dan berkualitas.



Kendala

Kendala utama dalam proses pencapaian target IKK Nilai Kinerja Anggaran yaitu adanya selfblocking anggaran dari Kementerian Keuangan sehingga mengurangi capaian realisasi anggaran BPPHLHK Wilayah Sulawesi di Omspan.

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan kendala tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2025 dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.



NILAI EFISIENSI



Efisiensi



Persentase
Realisasi Anggaran IKK 7
(input)



Persentase
Capaian IKK 7
(output)

Blokir AA dan
selfblocking

0,94
Efisien

99,17%

104,91%

Non Blokir AA
dan *selfblocking*

0,95
Efisien

99,96%

104,91%

Indikator Kinerja Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	Non Blokir AA dan <i>selfblocking</i>		Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	Non Blokir AA dan <i>selfblocking</i>
Layanan Umum	2.000.000.000	1.700.000.000	1.699.804.748	84,99	99,99
Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.000.000.000	1.700.000.000	1.699.804.748	84,99	99,99
Layanan Perkantoran	29.939.944.000	29.939.944.000	29.919.711.711	99,93	99,93
Gaji dan Tunjangan	26.283.000.000	26.283.000.000	26.263.173.619	99,92	99,92
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.656.944.000	3.656.944.000	3.656.538.092	99,99	99,99
Layanan Sarana Internal	6.172.400.000	6.172.400.000	6.172.388.087	100	100
Pengadaan Kendaraan Bermotor	1.750.100.000	1.750.100.000	1.750.100.000	100	100
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.346.035.000	1.346.035.000	1.346.035.000	100	100
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.681.385.000	1.681.385.000	1.681.373.287	100	100
Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1.394.880.000	1.394.880.000	1.394.879.800	100	100
Total	38.112.344.000	37.812.344.000	37.791.904.546	99,16	99,95

Sumber: OMSPAN, 2 Januari 2025



REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Wilayah Sulawesi pada Tahun 2024 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan kegiatan dengan didukung anggaran sebagaimana dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2024. Anggaran pada DIPA BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2024 **termasuk blokir AA dan self-blocking** tercatat sebesar Rp59.432.394.000 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*). Berdasarkan pagu DIPA BPPHLHK Wilayah Sulawesi tersebut, penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp57.983.729.998 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) atau setara dengan 97,56% (*Sumber: OM-SPAN BPPHLHK Wilayah Sulawesi T.A. 2024 tanggal 2 Januari 2025*). Sedangkan Anggaran pada DIPA BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2024 **tidak termasuk blokir AA dan self-blocking** tercatat sebesar Rp58.007.394.000 (*Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*), sehingga realisasi anggaran BPPHLHK Wilayah Sulawesi mencapai 99,96% (*Sumber: Akrual Sakti BPPHLHK Wilayah Sulawesi T.A. 2024 tanggal 2 Januari 2025*).



Rincian pagu dan realisasi anggaran BPPHLHK Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
	Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	Non Blokir AA dan <i>selfblocking</i>		Blokir AA dan <i>selfblocking</i>	Non Blokir AA dan <i>selfblocking</i>
Jumlah Layanan Umum	2,000,000,000	1,700,000,000	1,699,804,748	84,99	99,96
Jumlah Layanan Perkantoran	29,939,944,000	29,939,944,000	29,919,711,711	99,93	99,93
Jumlah Layanan Sarana Internal	6,172,400,000	6,172,400,000	6,172,388,087	100	100
Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	200,000,000	200,000,000	199,995,278	100	100
Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	5,478,940,000	4,683,414,000	4,683,083,532	85,47	99,99
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	5,079,730,000	5,079,730,000	5,079,184,304	99,99	99,99
Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani melalui Pengadilan dan diluar Pengadilan	470,000,000	386,816,000	386,345,250	82,20	99,88
Jumlah Badan Usaha Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	2,650,000,000	2,600,000,000	2,599,671,262	98,10	99,99
Jumlah Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan P-21	7,441,380,000	7,245,090,000	7,243,545,826	97,34	99,98
TOTAL	59,432,394,000	58,007,394,000	57,983,729,998	97.56%	99.96%



Efisiensi



Persentase Realisasi Anggaran (*input*)



Persentase Capaian (*output*)

Blokir AA dan *selfblocking*

0,81
Efisien

97,56%

120,76%

Non Blokir AA dan *selfblocking*

0,83
Efisien

99,96%

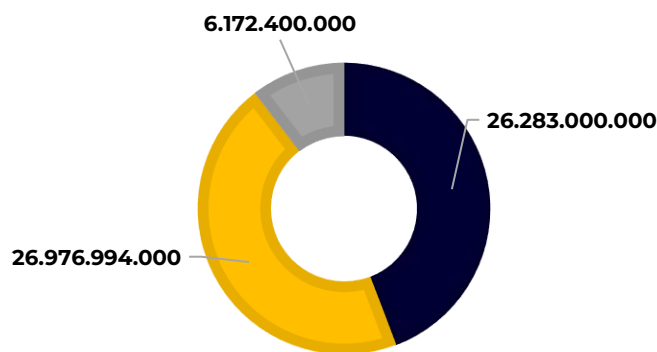
120,76%



Menurut jenis anggaran **termasuk blokir AA dan selfblocking**, alokasi belanja barang merupakan alokasi tertinggi berdasarkan jenis belanja yaitu sebesar 45% dilanjutkan belanja pegawai sebesar 44% dan belanja modal 11%. Penyerapan anggaran tertinggi berada pada jenis belanja modal sebesar 100,00% menyusul belanja pegawai 99,92% dan belanja barang 94,70%. Sedangkan berdasarkan anggaran yang **tidak termasuk blokir AA dan selfblocking** alokasi belanja Pegawai merupakan alokasi tertinggi berdasarkan jenis belanja yaitu sebesar 45% dilanjutkan belanja Barang sebesar 44% dan belanja modal 11%. Penyerapan anggaran tertinggi berada pada jenis belanja modal sebesar 100,00% menyusul belanja barang 99,99% dan belanja pegawai 99,92%.

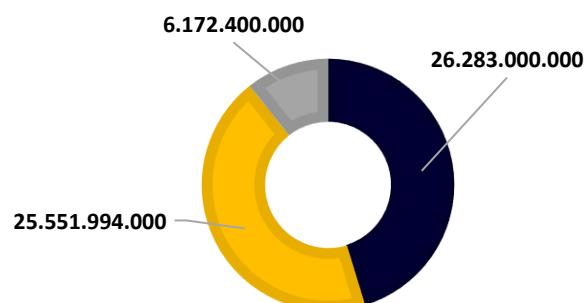
PROPORSI ANGGARAN BLOKIR AA DAN SELFBLOCKING

■ Belanja Pegawai (44%) ■ Belanja Barang (45%) ■ Belanja Modal (11%)



PROPORSI ANGGARAN NON BLOKIR AA DAN SELFBLOCKING

■ Belanja Pegawai (45%) ■ Belanja Barang (44%) ■ Belanja Modal (11%)



PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KINERJA

Sepanjang tahun 2024 BPPHLHK Wilayah Sulawesi terus berupaya untuk menorehkan tinta emas demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dari waktu ke waktu. Penghargaan yang diterima menjadi bukti bahwa BPPHLHK Wilayah Sulawesi senantiasa menjaga dan meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang optimal.



1. Piagam Penghargaan Menteri LHK

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Berhasil meraih Penghargaan Terbaik Ke – 1 Kategori Satuan Kerja Tahun Anggaran 2023 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, rapat ini dipimpin langsung oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dihadiri oleh seluruh unit kerja KLHK.

Penghargaan ini tak lepas dari upaya korektif dan kolektif dari segenap unsur Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Wilayah Sulawesi.





2. Piagam Penghargaan KPPN Makassar I

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sebagai Satker Peringkat Ketiga Penerima Penghargaan Penggunaan *Cash Management System* (CMS) Rekening Virtual Satker Terbaik Semester I Tahun 2024 dari Kepala KPPN Makassar I Direktorat Perbendaharaan Negara. Kriteria pemberian penghargaan ini berdasarkan data transaksi CMS Rekening Virtual (VA) yang dikelola Bendahara Pengeluaran.



3. Piagam Penghargaan Direktur PPSA LHK



Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Juara III sebagai Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, dalam acara Rapat Koordinasi di Yogyakarta pada tanggal 8 s.d 10 Agustus 2024.



PENUTUP 4



KESIMPULAN

1. BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah melaksanakan 7 Indikator kinerja kegiatan sesuai perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal PHLHK pada Tahun 2024 dan memperoleh capaian rata-rata 120,76%.
2. BPPHLHK Wilayah Sulawesi memiliki total pagu anggaran sebesar Rp59.432.394.000 (*lima puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), termasuk blokir AA sebesar Rp1.200.000.000 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) dan *self-blocking* sebesar Rp225.000.000 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*). Sehingga sisa pagu sebesar Rp58.007.394.000 (*lima puluh delapan milyar tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah*).
3. Realisasi BPPHLHK Wilayah Sulawesi sebesar Rp57.983.729.998 dengan persentase sebagai berikut :
 - a. Termasuk blokir dan *self-blocking* sebesar 97,56%.
 - b. Tanpa blokir dan *self-blocking* sebesar 99,96%.
4. Hasil pengukuran nilai efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja termasuk blokir AA dan *selfblocking* sebesar 0,93, sedangkan nilai efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja tidak termasuk blokir AA dan *selfblocking* sebesar 0,95 sehingga termasuk dalam kategori efisien..



SARAN

Untuk mewujudkan tercapainya target sasaran strategis IKK pada Renstra pada BPPHLHK Wilayah Sulawesi, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sama di tahun anggaran yang akan datang, sebagai berikut :

1. Melaksanakan evaluasi secara komprehensif terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ada merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan organisasi. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terdapat pada prosedur yang berlaku, serta mencari peluang untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, pembaruan SOP dilakukan dengan menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih relevan, efektif, dan efisien, sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, meminimalkan risiko kesalahan, dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan lebih terstruktur serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Diperlukan langkah untuk melakukan *benchmarking* secara menyeluruh, yang bertujuan membandingkan kinerja atau pencapaian dengan standar atau praktik terbaik tertentu. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi secara mendalam terhadap hasil atau dampak yang telah dihasilkan dari pencapaian output sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan efisiensi proses yang telah dijalankan.
3. Mengupayakan penguatan budaya inovasi di kalangan staf atau pegawai merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mendorong terciptanya berbagai solusi kreatif dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan. Upaya ini melibatkan pemberian motivasi, dukungan, serta fasilitasi yang diperlukan agar setiap individu dalam organisasi merasa terdorong untuk berkontribusi melalui ide-ide inovatif. Dengan demikian, keberlanjutan proses pengembangan layanan dapat terjaga, sekaligus menjamin kualitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan



4. Mengembangkan rencana strategis untuk program pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), merupakan langkah penting yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap pegawai maupun sasaran kerja unit terkait. Proses perencanaan ini melibatkan identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis mendalam terhadap keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas secara optimal. Selain itu, tujuan dari program ini adalah memastikan bahwa setiap pegawai mendapatkan pelatihan yang relevan, terfokus, dan sesuai dengan tanggung jawab mereka, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis unit kerja dalam organisasi secara keseluruhan.
5. Secara berkala, dilakukan evaluasi terhadap data monitoring untuk memantau secara menyeluruh pelaksanaan berbagai kegiatan yang sedang berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara dini kemungkinan adanya potensi masalah yang dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti pencapaian anggaran, keberhasilan indikator kegiatan, serta kelengkapan dan fungsi sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan. Setelah potensi masalah terdeteksi, langkah selanjutnya adalah merumuskan dan menyusun tindakan korektif yang tepat, guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan permasalahan yang ada dapat segera diatasi.
6. Melakukan Peningkatan efektivitas penanganan pengaduan dan pengawasan memerlukan langkah strategis yang terencana dan terintegrasi. Penyediaan database kegiatan yang komprehensif, optimalisasi platform online, penguatan mekanisme pemantauan penerapan sanksi administrasi, peningkatan kapasitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta evaluasi berkala dan perbaikan proses merupakan langkah-langkah kunci yang perlu diimplementasikan. Dengan mengadopsi pendekatan tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan pengaduan dan pengawasan dapat terus ditingkatkan, sehingga mendukung pencapaian tujuan instansi secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.



7. Melakukan penyesuaian terhadap jumlah target dalam Perjanjian Kinerja yang dirancang untuk periode lima tahun. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat jumlah target yang ditetapkan saat ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah dicantumkan dalam rencana strategis BPPHLHK Wilayah Sulawesi untuk tahun 2020-2024. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan strategis, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.





LAMPIRAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswin Bangun, S.Hut., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK
Wilayah Sulawesi

Aswin Bangun, S.Hut.,M.Si.
NIP. 19740228 200003 1 004

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH SULAWESI

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	
				Semula	Menjadi
1	Pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	20 Operasi	20 Operasi
			Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	17 Operasi	17 Operasi
			Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang
2	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan <small>Text</small>	2 Perkara	2 Perkara
3	Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	111 Badan Usaha	111 Badan Usaha
4	Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	30 Perkara	30 Perkara
5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen penegakan hukum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	96,86 Poin	81,00 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO		Anggaran	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	20 Operasi	20 Operasi	Rp 6.417.940.000,00	Rp 5.478.940.000,00
	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	17 Operasi	17 Operasi	Rp 5.611.380.000,00	Rp 5.079.730.000,00
DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	15 Orang	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00
QCE-Penanganan Perkara	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	2 Perkara	2 Perkara	Rp 580.000.000,00	Rp 470.000.000,00
QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	111 Badan Usaha	111 Badan Usaha	Rp 2.876.350.000,00	Rp 2.650.000.000,00
QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	30 Perkara	30 Perkara	Rp 7.871.380.000,00	Rp 7.441.380.000,00
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Rp 28.089.944.000,00	Rp 29.939.944.000,00
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	Rp 6.372.400.000,00	Rp 6.172.400.000,00
Total Anggaran				Rp60.019.394.000,00	Rp59.432.394.000,00

* Terdapat anggaran terblokir sebesar Rp1.425.000.000,00 dikarenakan Kebijakan Nasional Automatic Adjustment dan Penghematan Perjalanan Dinas.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK
Wilayah Sulawesi

Aswin Bangun, S.Hut.,M.Si.
NIP. 19740228 200003 1 004



BPPHLHK Wil. Sulawesi

Jalan Batara Bira No. 9, Baddoka, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan